



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

**Laporan Kinerja**  
Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Jember

**2025**

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2025. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan capaian kinerja tahun pertama dalam periode Rencana Strategis DJKN tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPKNL Jember Tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja (IKU/IK) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pekerjaan yang serba digital tidak menurunkan semangat maupun upaya seluruh insan KPKNL Jember dalam mewujudkan pencapaian kinerja organisasi. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, secara umum capaian kinerja KPKNL Jember telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jember Tahun 2025 sebesar 116,75%, dengan predikat sangat baik.

Tidak kalah penting dan yang paling utama, kami ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran KPKNL Jember, atas kinerja dan kerja sama yang baik sehingga KPKNL Jember mampu mencatat berbagai pencapaian selama tahun 2025 serta mampu mempertahankan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta sebagai evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja KPKNL Jember di masa yang akan datang. Selamat bekerja kepada seluruh jajaran KPKNL Jember, tetap bersinergi, terus semangat, dan semoga sukses di tahun 2026 ini.

Jember, 18 Februari 2026  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Wahyu Nendro





# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	6
A. LATAR BELAKANG	.....	6
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	.....	6
C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)	.....	9
D. SISTEMATIKA LAPORAN	.....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	.....	14
A. PERENCANAAN STATEGIS	.....	14
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	.....	15
C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	.....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	.....	22
A. CAPAIAN KINERJA	.....	22
B. REALISASI ANGGARAN	.....	58
<b>BAB IV PENUTUP</b>	.....	60
<b>LAMPIRAN</b>		

# DAFTAR TABEL

1.1	Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Golongan Unit Kerja	8
1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan	8
1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	8
1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Teknis	9
2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	17
2.2	Ikhtisar Addendum Indikator Kinerja	18
2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	20
3.1	CAPAIAN IKU KEMENKEU THREE KPKNL JEMBER TAHUN 2025	23
3.2	Capaian IKU Indeks Integritas	25
3.3	Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	27
3.4	Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	28
3.5	Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	30
3.6	Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang	31
3.7	Realisasi Pokok Lelang	31
3.8	Capaian IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	33
3.9	Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Nama Sasaran Strategis :Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi	35
3.10	Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	36
3.11	Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipkatkan	38
3.12	Target Sertifikasi BMN	38
3.13	Capaian Sertifikasi BMN	39
3.14	Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN	40
3.15	Realisasi IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN	40
3.16	Capaian IKU Persentase Saldo BKPN	42
3.17	Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	43
3.18	Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang	44
3.19	Realisasi IKU Persentase Produktivitas Lelang	45
3.20	Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	46
3.21	Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	48
3.22	Capaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan	49
3.23	Capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	50
3.24	Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	52
3.25	Capaian IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	54
3.26	Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	55
3.27	Capaian IKU Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	57
3.28	REALISASI ANGGARAN BELANJA KPKNL JEMBER PER 31 DESEMBER 2025	59

# DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi KPKNL Jember Tahun 2025	7
2.1	Peta Strategi Kemenkeu-Three KPKNL Jember Tahun 2025	16
2.2	Peta Strategi Kemenkeu-Three KPKNL Jember Tahun 2026	19
3.1	Capaian NKO KPKNL Jember Periode 5 Tahun Terakhir	22
3.2	Rincian Data Capaian Kinerja pada masing-masing Perspektif	22
3.3	Ikhtisar Capaian Kinerja	24
3.4	Realisasi IKU Indeks Integritas 5 tahun terakhir	26
3.5	Realisasi IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara 5 tahun terakhir	30
3.6	Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang 5 tahun terakhir	32
3.7	Realisasi IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara 5 tahun terakhir	34
3.8	Realisasi IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 5 tahun terakhir	36
3.9	Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 5 tahun terakhir	37
3.10	Realisasi IKU Persentase BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan 5 tahun terakhir	39
3.11	Realisasi IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN 5 tahun terakhir	41
3.12	Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyelesaian BKPN 5 tahun terakhir	42
3.13	Realisasi IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian 5 tahun terakhir	44
3.14	Realisasi IKU Persentase Produktivitas Lelang 5 tahun terakhir	45
3.15	Realisasi IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran 5 tahun terakhir	47
3.16	Realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 5 tahun terakhir	48
3.17	Realisasi IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum 5 tahun terakhir	51
3.18	Realisasi IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) 5 tahun terakhir	52
3.19	Realisasi IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko 5 tahun Terakhir	55
3.20	Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti 5 tahun terakhir	56
3.21	Realisasi IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM 5 tahun terakhir	58
3.22	Realisasi Anggaran 5 Tahun Terakhir	59

An illustration of two hands in blue, one holding a yellow scroll with a green band. The background is orange with blue and yellow geometric shapes.

# 01.

## Pendahuluan

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA  
(STRATEGIC ISSUES)
- D. SISTEMATIKA LAPORAN

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Jember dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bahwa KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Sedangkan pasal 31 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Jember didukung oleh 28 (dua puluh delapan) orang pegawai dengan komposisi pegawai berdasarkan golongan, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan umur sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Golongan**  
**Unit Kerja: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember**

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	SLTA	0	1	3	0	4
2.	D3	0	1	2	0	3
3.	D4/S1	0	2	14	0	16
4.	S2	0	0	1	4	5
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>28</b>

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan**

No	Kelompok Umur	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	28 - 40	0	3	8	0	11
2	41 - 50	0	1	5	2	8
3	Diatas 50	0	0	7	2	9
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>28</b>

**Tabel 1.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan**

No	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Perempuan	0	2	8	2	12
2	Laki-laki	0	2	12	2	16
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>28</b>

**Tabel 1.4.**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Teknis**

No.	Fungsional Teknis	Jumlah
1.	Fungsional Pelelang	3
2.	Fungsional Penilai	3
3.	Jabatan Fungsional Keuangan APBN	1
4.	Jurusita (Non Jabatan Fungsional)	2
5.	Penilai (Non Jabatan Fungsional)	7
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

### **C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)**

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Jember memiliki peran strategis dan permasalahan utama sebagai berikut:

#### 1. Peran Strategis KPKNL Jember :

##### a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN), KPKNL Jember memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk:

- Optimalisasi penerimaan (revenue center), efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara;
- Optimalisasi pendayagunaan aset-aset yang terindikasi idle dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi, dan hukum;
- Berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN. Dalam setiap tahapan pengelolaan BMN, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, KPKNL Jember senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama yang lebih baik antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengelolaan BMN. Membangun dan meningkatkan kemampuan (capacity building) dalam pengelolaan BMN pada tataran Kuasa Pengguna Barang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan BMN, sehingga sinergi antara Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang

menjadi sangat penting dan senantiasa ditingkatkan oleh KPKNL Jember dalam rangka pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang baik dan benar.

b. Optimalisasi Penataan Aset Menuju Revenue Center

PNBP menjadi alternatif dalam menyokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain penerimaan dari sektor perpajakan. Melalui pengelolaan BMN idle yang baik dan berdaya guna, KPKNL Jember sebagai Pengelola Barang dapat mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan aset idle, sehingga paradigma cost center tidak dominan dan dapat bergeser ke arah revenue center.

c. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, piutang macet yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perbankan tidak lagi diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/DJKN. Namun demikian, pengurusan piutang negara di lingkungan KPKNL Jember tetap dilaksanakan dengan tujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian/Lembaga.

D. Pelayanan Lelang

Lelang merupakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Lelang juga merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Jember secara terus menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi, sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (sales mean auction). Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya Risalah Lelang yang merupakan akta otentik/dokumen negara. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta van transport untuk kepentingan peralihan hak. Dengan demikian, KPKNL Jember diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati

masyarakat, seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah kerjanya. Tuntutan pelaksanaan lelang yang lebih transparan dan akuntabel telah dijawab dengan inovasi pelaksanaan lelang secara elektronik (E-Auction). Diharapkan pelaksanaan lelang adaptif 8 Laporan Kinerja KPKNL Jember Tahun 2024 dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.

E. Penilaian Kekayaan Negara

Layanan penilaian diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Pelaksanaan penilaian terhadap BMN/Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian dari optimalisasi pengelolaan BMN/BMD. Penilaian tersebut antara lain akan digunakan dalam rangka penyusunan LKPP/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemanfaatan, pemindahtanganan, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan pengurusan piutang negara/daerah. Dengan demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang optimal, efektif, dan efisien.

F. Memberikan Kontribusi Pemasukan PNBPN ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Jember memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara, sedangkan dalam pelayanan lelang, KPKNL Jember memperoleh hasil Bea Lelang (pembeli dan/atau penjual) dan PNBPN lelang lainnya termasuk Bea Lelang Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBPN. Selain itu, secara tidak langsung dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Jember juga memberikan kontribusi cukup besar dalam hal pemberian persetujuan pemanfaatan aset (sewa) dan persetujuan pemindahtanganan/ penjualan BMN.

2. Permasalahan Utama (Strategic Issues) KPKNL Jember

- a. Dalam hal pengelolaan kekayaan negara, hingga saat ini masih dijumpai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang belum optimal dalam melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan aset, khususnya aset tetap. Hal ini terdeteksi antara lain dari belum tertib dan validnya data BMN yang ditatausahakan, dukungan dan kesadaran dalam mengoptimalkan

penggunaan BMN, serta pemanfaatan BMN sesuai dengan ketentuan. Masih dijumpai BMN bermasalah, yang meliputi BMN belum memiliki dokumen kepemilikan, BMN dikuasai pihak lain, BMN dalam sengketa, BMN belum ditemukan, dan BMN rusak berat tetapi belum dihapuskan. Hal tersebut sedikit banyak cukup menghambat tata kelola atas aset-aset tersebut selanjutnya.

- b. Prosedur pasca lelang yang masih belum memberikan kepastian hukum kepada pembeli lelang, khususnya untuk lelang barang jaminan hak tanggungan yang masih dikuasai oleh pemilik sebelumnya menjadi salah satu faktor yang menurunkan minat masyarakat terhadap objek lelang eksekusi hak tanggungan berupa tanah dan/atau bangunan.
- c. Dengan semakin bertambahnya frekuensi lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Jember, semakin bertambah pula keberatan, perlawanan, ataupun gugatan terhadap pelaksanaan lelang, khususnya lelang eksekusi hak tanggungan yang merupakan sumber gugatan terbanyak yang ditangani oleh KPKNL Jember.
- d. Dalam hal Pengurusan Piutang Negara, masih banyak terdapat penyerahan piutang yang tidak didukung dengan barang jaminan, dan apabila terdapat barang jaminan, nilai barang jaminan tidak memadai untuk pelunasan utang.

#### **D. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan kinerja KPKNL Jember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

##### **Bab I      Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan dengan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **Bab II     Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja dan juga penjelasan mengenai addendum kontrak kinerja.

##### **Bab III    Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:

###### **A. Capaian Kinerja**

Pada sub bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

## **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini menguraikan realisasi penggunaan DIPA 2025 dan keluaran (output) dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan di tahun 2025, dengan memperhatikan perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

### **Lampiran**

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2026
- 2) Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2025



# 02.

## Rencana Kinerja

- A. PERENCANAAN STRATEGIS TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
- C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2025–2029 DJKN sebagai induk organisasi KPKNL Jember merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

KPKNL Jember memberikan pelayanan pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang Yang Akuntabel, Produktif, dan Inovatif Dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan”.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan DJKN adalah Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara, Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum dan Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN telah menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, terdapat 4 (empat) sasaran yang terkait dengan DJKN yaitu

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

## **B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

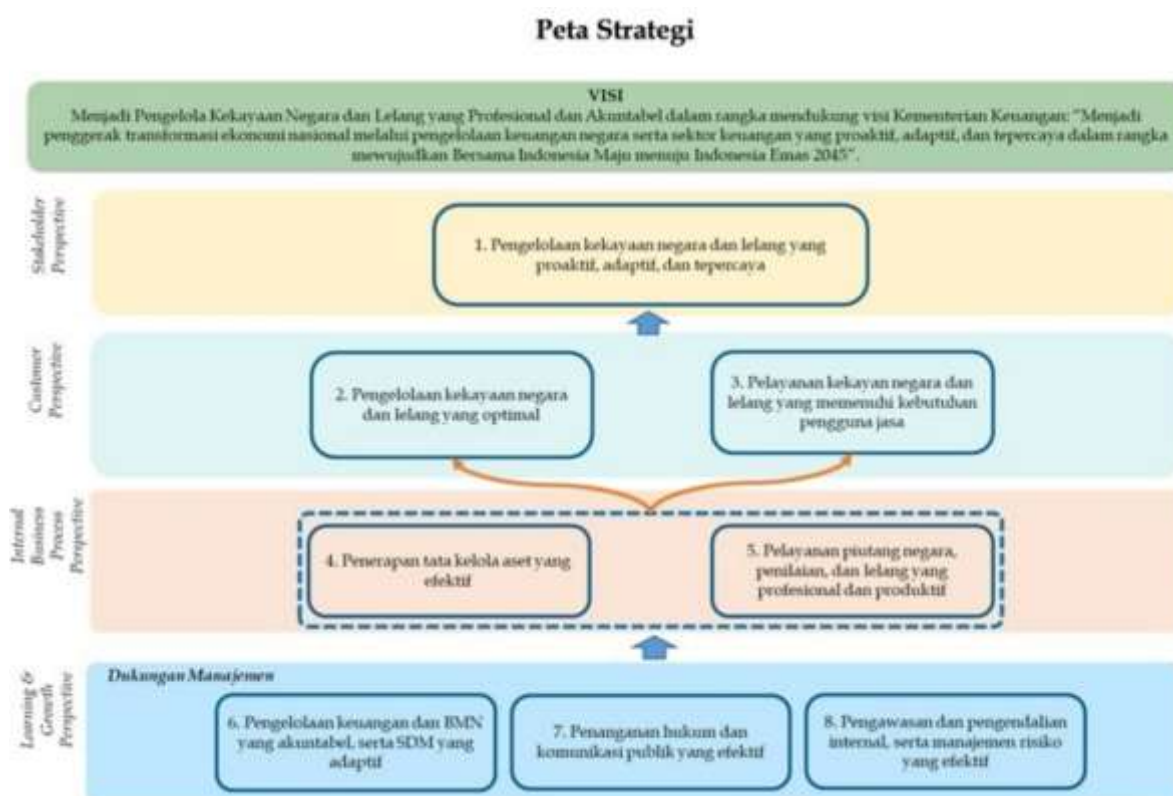
Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. KPKNL Jember Menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran strategis KPKNL Jember tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya;

2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
4. Penerapan tata Kelola aset yang efektif;
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
7. Penanganan hukum dan komunikasi public yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

**Gambar 2.1**  
**Peta Strategi Kemenkeu-Three**  
**KPKNL Jember Tahun 2025**



Peta Strategi KPKNL Jember menetapkan 4 perspektif, yaitu: stakeholder perspective, customer perspective, internal business process perspective dan learning and growth perspective. Stakeholder perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Customer perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Internal business process perspective berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan learning and growth perspective berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari Perjanjian Kinerja KPKNL Jember Tahun 2025 setelah adendum diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Jember mencapai 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Adapun sasaran strategis dan IKU KPKNL Jember adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

SASARAN STRATEGIS	IKU	SATUAN	TARGET
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>			
1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks Integritas	Indeks	100
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100
<b>Customer Perspective (20%)</b>			
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	%	100
	Persentase realisasi pokok lelang	%	100
	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	%	100
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	74
	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks	77
<b>Internal Business Process Perspective (25%)</b>			
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	%	100
	Persentase evaluasi kinerja BMN	%	100
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	%	100
	Tingkat kualitas layanan penilaian	%	70
	Persentase produktivitas lelang	%	80
<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>			

6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	Indeks	100
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	80
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks	100
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	Indeks	100
	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Indeks	80
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	Indeks	80
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	%	95.3
	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	Indeks	100

Adapun untuk addendum perjanjian kinerja dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang akan diraih sejalan dengan tuntutan kepuasan stakeholders terhadap pelayanan yang berbasis pada kemajuan teknologi informasi, Addendum tersebut selanjutnya dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kinerja KPKNL Jember Tahun 2025. Addendum peta strategis KPKNL Jember Tahun 2025 memuat adanya 1 (satu) perubahan sebagai berikut pada perubahan indikator kinerja utama.

**Tabel 2.2**  
**Ikhtisar Addendum Indikator Kinerja**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Semula		Menjadi			
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (Rp1,5 M)	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (Rp1,9 M)

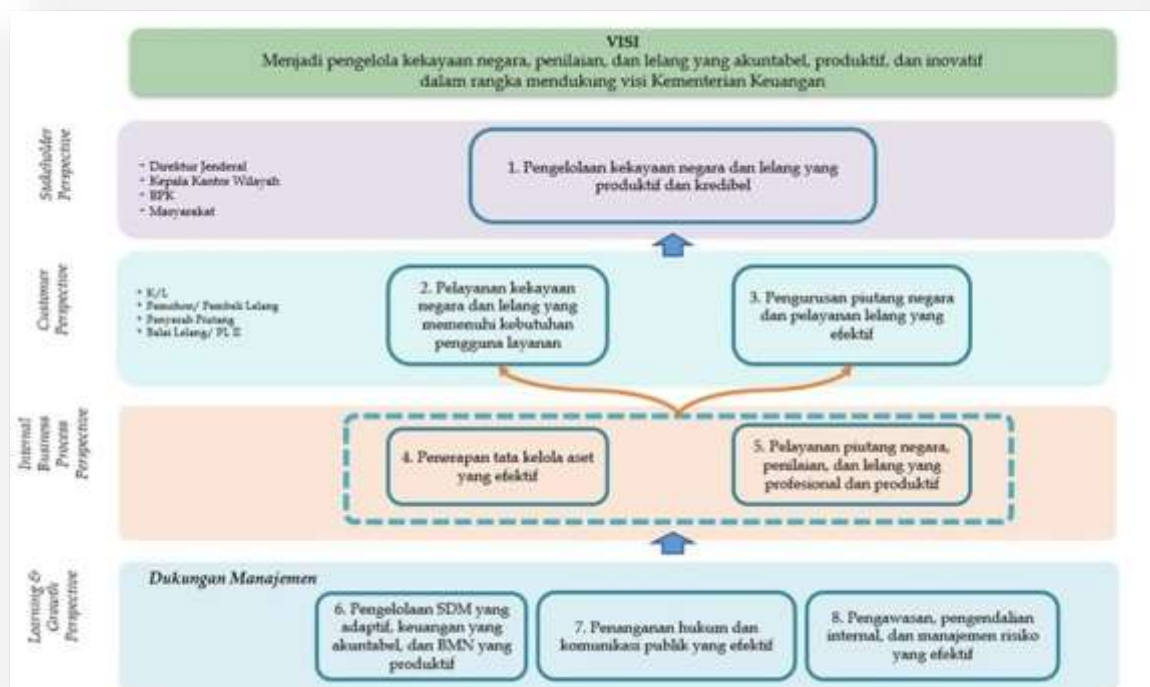
### C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sasaran strategis KPKNL Jember tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel;
2. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan;
3. Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif;

4. Penerapan tata kelola aset yang efektif
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
6. Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif;
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif;

**Gambar 2.2**  
**Peta Strategi Kemenkeu-Three**  
**KPKNL Jember Tahun 2026**



Peta Strategi KPKNL Jember 2026 menetapkan 4 perspektif, yaitu: stakeholder perspective, customer perspective, internal business process perspective dan learning and growth perspective. Stakeholder perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Customer perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Internal business process perspective berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan learning and growth perspective berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari peta strategi KPKNL Jember Tahun 2026 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Jember mencapai 8 (delapan) Sasaran

Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Adapun sasaran strategis dan IKU KPKNL Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

SASARAN STRATEGIS	IKU	SATUAN	TARGET
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>			
1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks	100
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100
<b>Customer Perspective (20%)</b>			
2. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	%	100
	Tingkat efektivitas pembinaan	%	80
	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	%	100
3. Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	%	100
	Persentase realisasi kinerja lelang	%	100
<b>Internal Business Process Perspective (25%)</b>			
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	%	100
	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	%	100
	Persentase evaluasi kinerja BMN	%	100
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	%	100
	Tingkat kualitas layanan penilaian	%	80
	Persentase produktivitas lelang	%	85
<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>			
6. Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	100
	Indeks kualitas kinerja anggaran	Indeks	100
	Indeks pengelolaan kearsipan	Indeks	80
	Indeks efektivitas komunikasi publik	Indeks	80

7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	Indeks	80
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	Indeks	100
	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Indeks	83



# 03.

## Akuntabilitas Kinerja

- A. CAPAIAN KINERJA
- B. REALISASI ANGGARAN

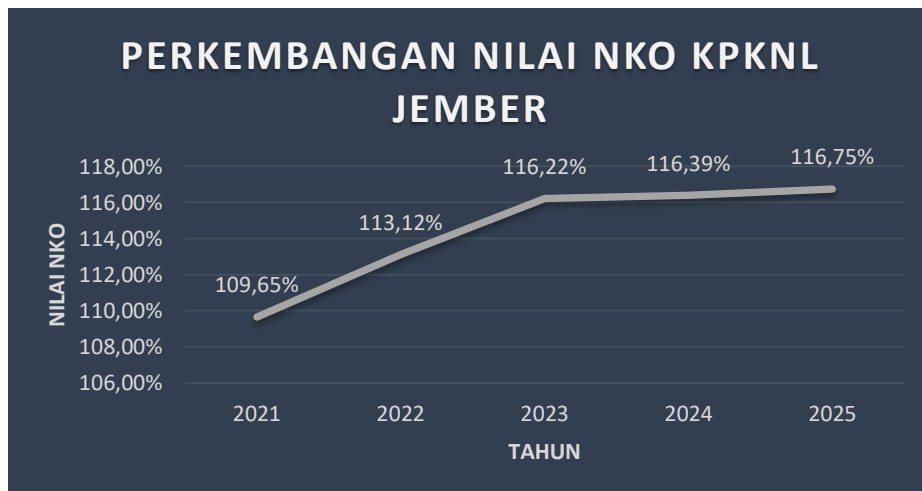
# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan implementasi dari capaian IKU yang ditargetkan pada penetapan kinerja di awal tahun. Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jember sebesar 116,75%.

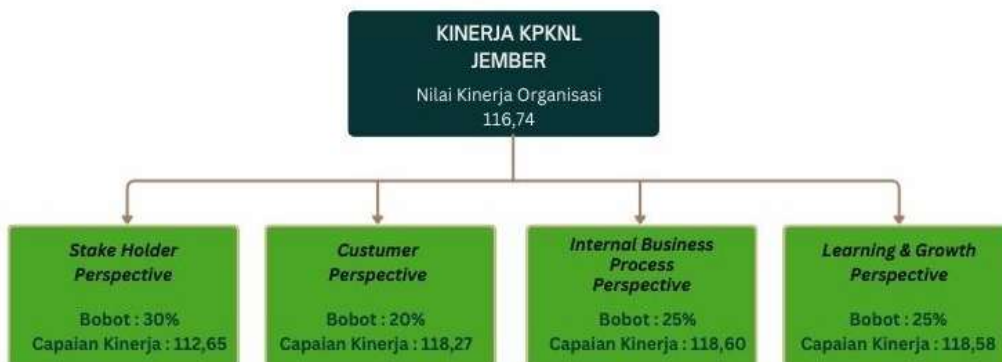
Perbandingan capaian NKO KPKNL Jember dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Capaian NKO KPKNL Jember Periode 5 Tahun Terakhir**



Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja tahun 2025 diketahui bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jember sebesar 116,75% dengan rincian data capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

**Gambar 3.2**  
**Rincian Data Capaian Kinerja pada masing-masing Perspektif**



## A.1 Perbandingan Antara Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025

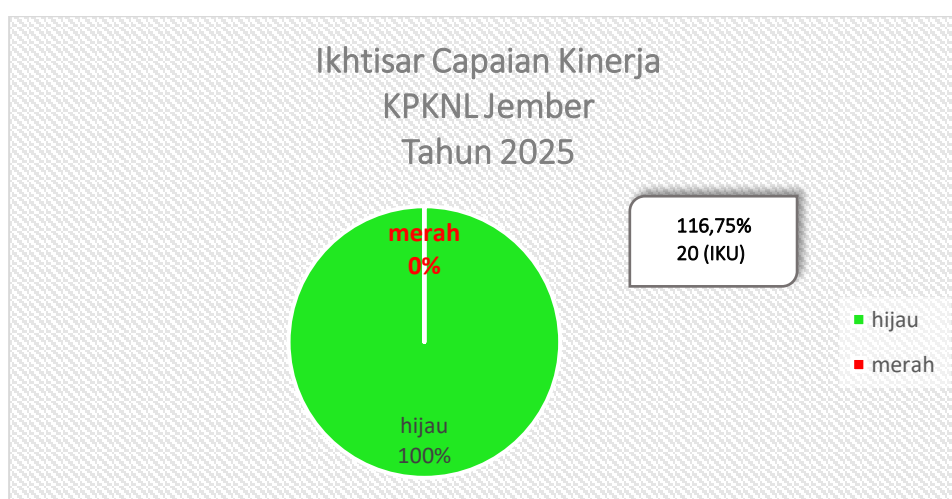
**Tabel 3.1**  
**CAPAIAN IKU KEMENKEU THREE**  
**KPKNL JEMBER**  
**TAHUN 2025**

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>				
1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks Integritas	100	105,32	105,32
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	151,25%	120
<b>Customer Perspective (20%)</b>				
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	110,53%	110,53
	Persentase realisasi pokok lelang	100%	147,84%	120
	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	120,38%	120
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	96,25	120
	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	96,95	120
<b>Internal Business Process Perspective (25%)</b>				
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	60%	139,33%	120
	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	114,42%	114,42
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	133,88%	120
	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	102,84%	120
	Persentase produktivitas lelang	80%	120%	120
<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>				
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	93,20%	120
	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	126,22	120
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	116,40	116,40
	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	111,25	120

8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	98,28	120
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95,30%	110,65%	116,11
	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	100	120	120
<b>NILAI KERJA ORGNISASI (NKO)</b>				<b>116,75</b>

Pada tahun 2025, KPKNL Jember memiliki 20 (dua puluh) IKU dan semuanya tercapai dengan status hijau.

**Gambar 3.3**  
**Ikhtisar Capaian Kinerja**



Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu Three Tahun 2025 tercapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,75%. Jika dibandingkan dengan NKO tahun 2024 sebesar 116,39% maka nilai kinerja KPKNL Jember tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,30%, dengan predikat NKO yang diperoleh KPKNL Jember tahun 2025 adalah sangat baik dengan status IKU berwarna hijau.

## **A.2 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi**

Hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu Three Tahun 2025 KPKNL Jember adalah sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis:**

#### **1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya**

Kementerian Keuangan memperoleh mandat sebagai pengelolaan keuangan negara yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan pertanggungjawaban Keuangan Negara. Kementerian Keuangan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan mandat dan tugas tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan penuh integritas dan secara akuntabel. APBN memiliki fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi yang diharapkan dapat mendukung perekonomian. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi Indonesia Maju pada tahun 2045, Kementerian Keuangan ikut aktif mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program transformasi ekonomi. Program ini diharapkan dapat dilakukan secara akuntabel dan mampu meningkatkan produktivitas, hilirisasi ekonomi, penggunaan energi yang ramah lingkungan, dan peningkatan investasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jember mengidentifikasi 2 (dua) IKU sebagai berikut :

### 1.1 Indeks Integritas :

IKU ini bertujuan untuk memastikan peningkatan budaya integritas di seluruh organisasi Kementerian Keuangan yang dinilai menggunakan Survei Penilaian Integritas. Penilaian integritas yang dimaksud adalah penilaian yang dilakukan kepada KPKNL Jember dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Penilaian integritas dilakukan pada Triwulan III sampai dengan Triwulan IV tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK. Capaian IKU Indeks Integritas tahun 2025 sebagai berikut:

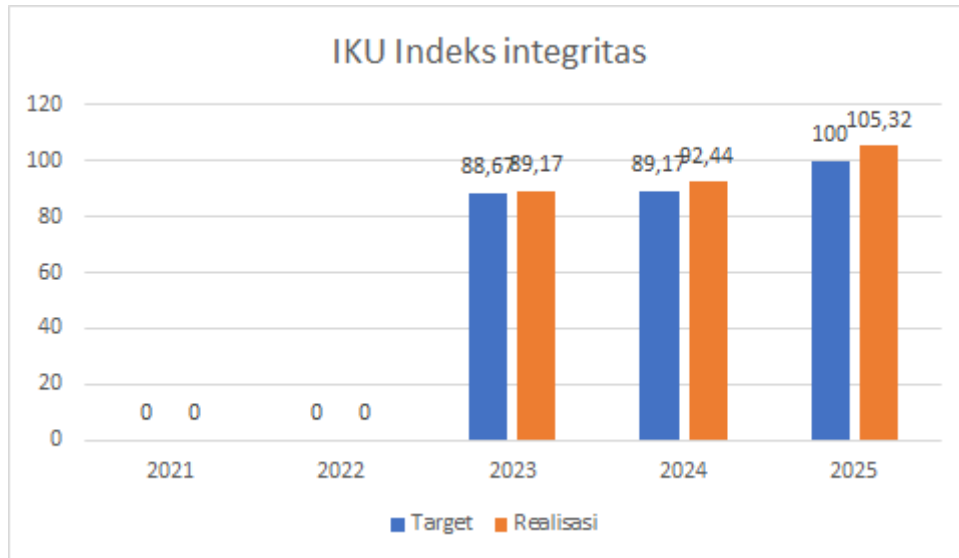
**Tabel 3.2**  
**Capaian IKU Indeks Integritas**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	Nama IKU : Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	100	100	122	122	105,32	105,32	
Capaian	120	120	120	120	120	105,32	105,32	

### Analisa Data :

Nilai dari Indeks Integritas ini adalah 105,32 dari target 100. Nilai ini digunakan oleh seluruh satker DJKN di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan capaian SKP di tahun 2025, pelayanan yang diberikan secara berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai integritas.

**Gambar 3.4**  
**Realisasi IKU Indeks Integritas 5 tahun terakhir**



### 1.2 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang :

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1. PNBPN Kekayaan Negara (PNBPN Aset), yaitu :
  - a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan,
  - b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan

## 2. PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara.

## 3. PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL 1 dan Pegadaian;
- bea lelang batal atas permintaan penjual,
- biaya permohonan lelang,
- uang jaminan pembeli wanprestasi,
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	Nama IKU : Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100% (1,98M)	100% (5,96M)	100% (5,96M)	100% (12,36 M)	100% (12,36 M)	100% (19,87 M)	100% (19,87 M)	Max/ TLK
Realisasi	175,96 % (3,49M)	135,42 % (8,07M)	135,42 % (8,07M)	148,50% (18,36M)	148,50% (18,36M)	151,25 % (30,05 M)	151,25 % (30,05)	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

### Analisis Data :

Capaian pada tahun 2025 adalah sebesar Rp30.057.118.331,00 dari target 2025 sebesar Rp19.872.300.000,00. Adapun rincian realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Uraian	Target	Realisasi	%
PNBP dari Pengelolaan BMN	Rp. 13.564.000.000	Rp. 20.831.213.021	153,58%
PNBP dari Piutang Negara	Rp. 3.300.000	Rp. 9.039.538	273,93%
PNBP dari Lelang	Rp. 19.872.300.000	Rp. 9.216.865.772	146,18%
<b>Total</b>	<b>Rp. 19.872.300.000</b>	<b>Rp. 30.057.118.331</b>	<b>151,25%</b>

Pada tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang mencapai 151,25%. Beberapa kejadian yang berkontribusi terbesar terhadap Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2025 antara lain :

1. Penerimaan klaim asuransi dari pesawat latih yang mengalami kecelakaan pada satker Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dengan nilai mencapai 4 milyar rupiah lebih;
2. Hasil lelang kertas suara pada satker Komisi Pemilihan Umum kota dn kabupaten di wilayah kerja KPKNL Jember dengan total nilai mencapai 3 milyar rupiah lebih;
3. Hasil lelang Undang-Undang Hak Tanggungan oleh PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Wilayah VII-Malang, dengan nilai kontribusi PNBP sebesar 1 milyar rupiah lebih.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang antara lain meliputi:

1. **BKPN tanpa jaminan:** Sekitar 77% dari total BKPN (247) tidak didukung Barang Jaminan, sehingga tingkat ketertagihan menjadi sangat kecil.
2. **Penyerahan BKPN oleh Pemda dan BLUD:** Sebanyak 83 BKPN berasal dari penyerahan Pemda dan BLUD. Mayoritas debitur berasal dari masyarakat tidak mampu, yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak mampu dalam berkas penyerahan.
3. Untuk pencapaian PNBP lelang, masih cukup banyak lelang yang tidak ada peminat, terutama lelang eksekusi hak tanggungan.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan mencapai target IKU, langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi:

1. Melakukan penagihan langsung/melalui surat dan penelitian lapangan, baik kepada Penanggung Utang/Penjamin Utang.
2. Melaksanakan joint collection (penagihan bersama) dan melibatkan peran serta Penyerah Piutang untuk menagih piutang ke Penanggung Utang.
3. Berkoordinasi dengan satuan kerja, terutama Kejaksaan, untuk melaksanakan lelang (baik lelang inventaris maupun barang rampasan).
4. Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
5. Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM).
6. Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
7. Meningkatkan publikasi lelang melalui media sosial KPKNL Jember.

## **2. Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Optimal**

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal merupakan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa, serta memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jember mengidentifikasi 2 (dua) IKU sebagai berikut.

### **2.1. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara**

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja

pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	Nama IKU : Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	88,89%	100,72%	100,72%	109,26%	109,26%	110,53%	110,53%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	110,53%	110,53%	

**Analisa Data:**

Capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara tahun 2025 sebesar 110,53 % dengan realisasi kenaikan sebesar 10,53% dari target yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara pada tahun 2025 rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan survei evaluasi kinerja portofolio asset dan pemetaan NUP BMN yang telah dievaluasi;
2. Menyampaikan Surat Rekomendasi hasil Evaluasi Kinerja BMN kepada satuan kerja;
3. Menghimbau satuan kerja untuk menindaklanjuti secara tertulis hasil Evaluasi Kinerja BMN melalui aplikasi SIMAN v2.

**Gambar 3.5**  
**Realisasi IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara 5 tahun terakhir**



## 2.2. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Sementara untuk Bea Lelang diperhitungkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan. Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Nama IKU : Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100% (16,91M)	100% (50,73M)	100% (50,73M)	100% (101,46M)	100% (101,46M)	100% (169,10M)	100% (169,19M)	Max/ TLK
Realisasi	224,08% (37,89M)	159,79% (81,06M)	159,79% (81,06M)	128,01% (129,88M)	128,01% (129,88M)	147,84% (249,99M)	147,84% (249,99M)	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

### Analisa Data :

Pokok Lelang KPKNL Jember Tahun 2025 terdiri dari Pokok Lelang Pejabat Lelang Kelas I dan Pokok Lelang Pegadaian dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Pokok Lelang**

Uraian	Target	Realisasi	%
Pokok Lelang PL Kelas I	Rp. 115.421.000.000	Rp. 198.660.899.077	172,12%
Pokok Lelang Pegadaian	Rp. 53.679.000.000	Rp. 51.331.582.000	95,63%
<b>Total</b>	<b>Rp. 169.100.000.000</b>	<b>Rp. 249.992.481.077</b>	<b>147,84%</b>

Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang tahun 2025 sebesar 120%. Salah satu kontribusi terbesar terhadap capaian realisasi pokok lelang tahun 2025 terjadi di akhir tahun melalui lelang Undang-Undang Hak

Tanggungjawab oleh PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Wilayah VII-Malang, dengan nilai pokok lelang sebesar 20 milyar rupiah lebih.

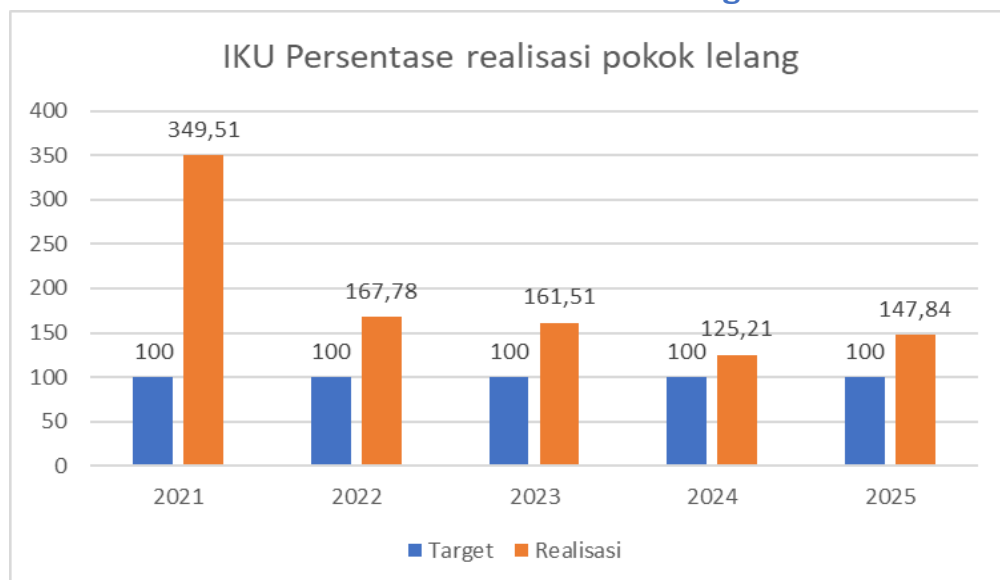
Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang, antara lain sebagai berikut:

1. Barang yang dilelang tidak free and clear (masih berpenghuni/masih ada permasalahan) namun guna mencapai target yang diharapkan upaya menjadikan laku tetap menjadi prioritas utama.

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya cukup besar dan menetapkan nilai limit lelang secara bertahap sampai ke nilai likuidasi.
2. Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder dengan objek lelang yang potensial laku, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Kejaksaan, lelang BMN dan BMD, serta lelang sukarela (termasuk lelang produk UMKM).
3. Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan pemasaran objek lelang.
4. Meningkatkan publikasi lelang melalui media sosial resmi KPKNL Jember.

**Gambar 3.6**  
**Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang 5 tahun terakhir**



### 2.3. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);

Capaian IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

#### Capaian IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Nama IKU : Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/ K P
Target	100% (0,9M)	100% (1.125M)	100% (1,125M)	100% (1,35M)	100% (1,35M)	100% (1,5M)	100% (1,5M)	M ax / TL K
Realisasi	153,67% (1,38M)	152,86% (1,72M)	152,86% (1,72M)	141,94% (1,91M)	141,94% (1,91M)	121,79% (2,3M)	120,38% (2,3M)	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

#### Analisa Data :

Target outstanding piutang negara tahun 2025 sebesar Rp1.350.000.000. Hingga akhir periode Triwulan IV tahun 2025 dapat terealisasi penyelesaian piutang negara sebesar Rp2.307.270.065 atau tercapai sebesar 120,38% dari target tahun 2025. Nilai tersebut dihasilkan dari angsuran para

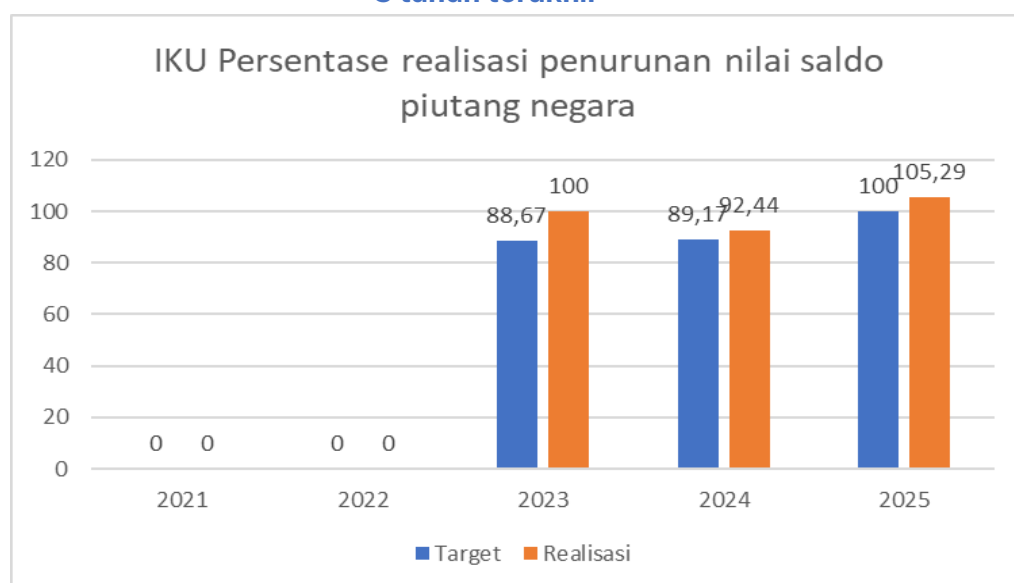
debitur, pelunasan dari 4 debitur piutang macet dan penerbitan PSBDT terhadap 93 BKPN yang sudah optimal pengurusannya.

Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh faktor-faktor:

1. kemauan dan itikad baik Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutangnya;
2. upaya penagihan bersama antara KPKNL Jember dengan Penyerah Piutang;
3. mengintensifkan pemetaan BKPN potensial sesuai dengan daya dukung penyelesaian piutang Negara;
4. dukungan dari aparaturn setempat/kelurahan/desa dalam menyediakan informasi kependudukan serta mata pencaharian guna menelusuri keberadaan dan kondisi ekonomi debitur, baik secara lisan maupun berupa surat keterangan dari pejabat daerah setempat.

**Gambar 3.7**

**Realisasi IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara 5 tahun terakhir**



### **3. Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa**

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k)

ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jember mengidentifikasi 2 (dua) IKU sebagai berikut :

### 3.1. Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis :Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa.							
	Nama IKU : Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/ AVG
Realisasi	85	100	92,50	100	95	100	96,25	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

#### Analisa Data :

Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi pada Tahun 2025 adalah sebesar 120 dengan realisasi sebesar 96.25 dari target tahun 2025 sebesar 74. Capaian tersebut juga didukung dengan realisasi kegiatan edukom lelang dan Piutang Negara pada periode Triwulan IV dengan capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi masing-masing yaitu :

1. Indeks Efektivitas Edukom Piutang Negara : 100
2. Indeks Efektivitas Edukom Lelang : 100

**Gambar 3.8**  
**Realisasi IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 5 tahun terakhir**



### 3.2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan KPKNL dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terhadap komponen :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Layanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Sarana Prasarana;
9. Sarana Pengaduan.

Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2025 sebagai berikut :

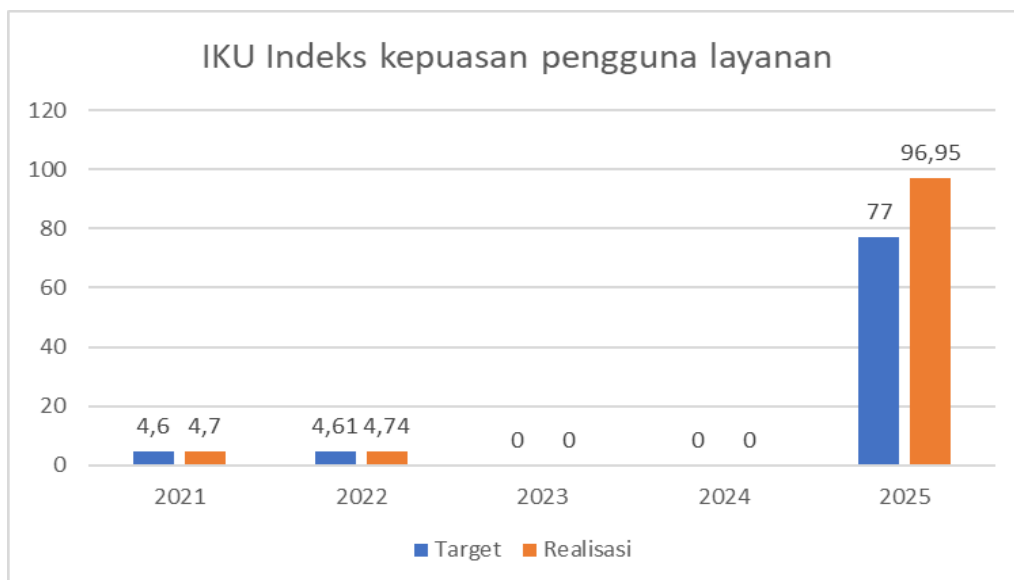
**Tabel 3.10**  
**Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa.							
	Nama IKU : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/ AVG
Realisasi	97,78	96,40	97,09	97,40	97,19	96,20	96,95	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

### Analisa data :

Berdasarkan hasil pengolahan data dari Biro Organta, KPKNL Jember memperoleh nilai 96.20 dari skala 100. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya penyebaran kuesioner pada seluruh penerima layanan KPKNL Jember selama periode tahun 2025, baik melalui tatap muka maupun konsultasi melalui media online.

**Gambar 3.9**  
**Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 5 tahun terakhir**



#### 4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif.

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam Siklus BMN, diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara dikatakan efektif apabila penerapan pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik, tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/outcome yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jember mengidentifikasi 3 (tiga) IKU sebagai berikut.

##### 4.1. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penseripikatan BMN berupa Tanah. Pada

prinsipnya BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/ atau menggunakan Barang Milik Negara. Ruang Lingkup sertipikasi BMN meliputi tanah yang belum bersertipikat atau tanah yang sudah bersertipikat tetapi belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara/Lembaga. Sertipikasi BMN bertujuan untuk mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian. Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	Nama IKU : Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	17,68%	47,26%	47,26%	74,39%	74,39%	139,33%	139,33%	
Capaian	120	118,14	118,14	120	120	120	120	

**Analisa Data :**

Target bidang tanah yang disertipikatkan Tahun 2025 pada KPKNL Jember sebanyak 328 bidang dan realisasi sebanyak 457 bidang, atau sebesar 139,33%, sehingga nilai capaian pada tahun 2025 sebesar 120, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Target Sertipikasi BMN**

TARGET SERTIPIKASI BMN										
K1		K2		K3		K4		TOTAL PADA IKI UTAMA		
NUP	Bid	NUP	Bid	NUP	Bid	NUP	Bid	NUP	Bid	Luas (m2)
79	147	0	0	180	180	1	1	260	328	4,546,884

**Tabel 3.13**  
**Capaian Sertifikasi BMN**

TOTAL CAPAIAN									
K1		K2		K3		K4		JUMLAH	
NUP	Bid	NUP	Bid	NUP	Bid	NUP	Bid	Capaian	%
19	84	0	0	180	185	188	188	457	139.33%

Penjelasan :

Kategori	Uraian Bidang Tanah	Output Target
K1	<b>Clean and Clear</b> (data yuridis dan fisik lengkap, dan tidak sengketa/berperkara)	Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/ Lembaga
K2	<b>Not Clean But Clear</b> (data yuridis dan fisik tidak lengkap namun tidak sengketa/berperkara)	
K3	<b>Clean But Not Clear</b> (data yuridis dan fisik lengkap namun sengketa/berperkara), dan <b>Not Clean and Not Clear</b> (data yuridis dan fisik tidak lengkap serta sengketa/berperkara)	PBT (Peta Bidang Tanah)/ Produk Lainnya
K4	Sudah bersertipikat Hak Pakai a.n. Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga tetapi belum dilakukan update data pada Master Aset Tanah aplikasi SIMAN	Update data tanah pada Master Aset SIMAN dan Validasi pada Valserah

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target sertifikasi BMN antara lain:

1. melakukan koordinasi dan sinergi antara pihak terkait yaitu Satuan Kerja, Kantor Pertanahan, KPKNL Jember dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan tanah tersebut.
2. melakukan identifikasi dan verifikasi atas data tanah yg menjadi target sertifikasi tahun 2025 untuk memastikan bahwa tanah yang masuk kategori K1 sudah clean and clear.

**Gambar 3.10**  
**Realisasi IKU Persentase BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan 5 tahun terakhir**



## 4.2. Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001. Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	Nama IKU : Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	17,14%	67,58%	67,58%	99,81%	99,81%	114,42%	114,42%	
Capaian	114,27	120	120	120	120	114,42	114,42	

### Analisa Data :

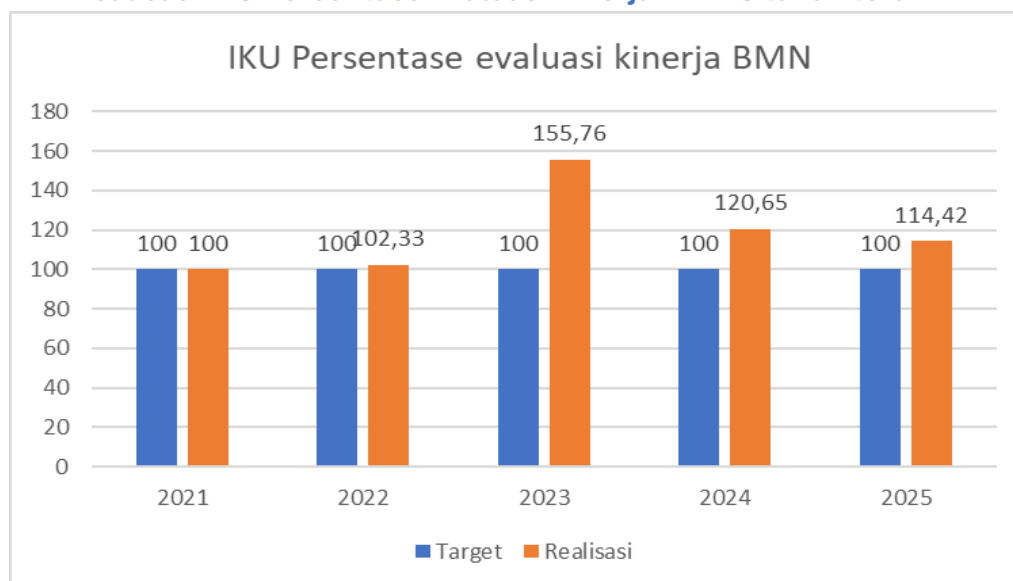
Pelaksanaan evaluasi kinerja BMN pada KPKNL Jember tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasi kegiatan yang dicapai yaitu :

**Tabel 3.15**  
**Realisasi IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN**

Kategori	Target	Realisasi	Capaian
Komponen A	770 NUP	838 NUP	108,83%
Komponen B	39 NUP	61 NUP	120%
<b>Capaian IKU</b>			<b>114,42%</b>

Komponen A adalah aset yang di evaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya (Bobot 50 %), dan Komponen B adalah rekomendasi evaluasi kerja yang ditindaklanjuti satker (bobot 50%).

**Gambar 3.11**  
**Realisasi IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN 5 tahun terakhir**



## 5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif tercermin dalam pelayanan piutang negara yang memberikan manfaat finansial kepada negara dengan menurunnya saldo outstanding piutang negara, hasil penilaian aset yang dapat dipertanggungjawabkan, dipahami, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat digunakan secara maksimal untuk pengambilan keputusan, dan pelayanan lelang yang dilakukan sesuai standar prosedur operasi, efisien, transparan yang memberikan manfaat baik secara finansial dan penegakan hukum. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jember mengidentifikasi 3 (tiga) IKU sebagai berikut.

### 5.1. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas;
2. BKPN Penarikan;

3. BKPN dikembalikan;
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Capaian IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Capaian IKU Persentase Saldo BKPN**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif							
	Nama IKU : Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	180,40%	140,80%	140,80%	113,85%	113,85%	133,88%	133,88%	
Capaian	120	120	120	113,85	113,85	120	120	

**Analisa Data :**

Target Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara tahun 2025 sebanyak 80 BKPN dan terealisasi sebanyak 97 BKPN (133,88%), yang berasal dari pelunasan 4 debitur piutang macet dan penerbitan PSBDT terhadap 93 BKPN yang sudah optimal pengurusannya.

Upaya pencapaian target antara lain dilakukan dengan melakukan pengurusan piutang negara secara optimal. Terhadap BKPN yang sudah optimal pengurusannya dan tidak adanya barang jaminan atau keberadaan penanggung hutang tidak diketahui maka diterbitkan PSBDT (Pernyataan Sementara Belum Dapat Ditagih). Selain itu tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU ini tidak lain adalah dengan pemetaan BKPN Potensial.

**Gambar 3.12**  
**Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyelesaian BKPN 5 tahun terakhir**



## 5.2. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian tahun 2025 sebagai berikut :

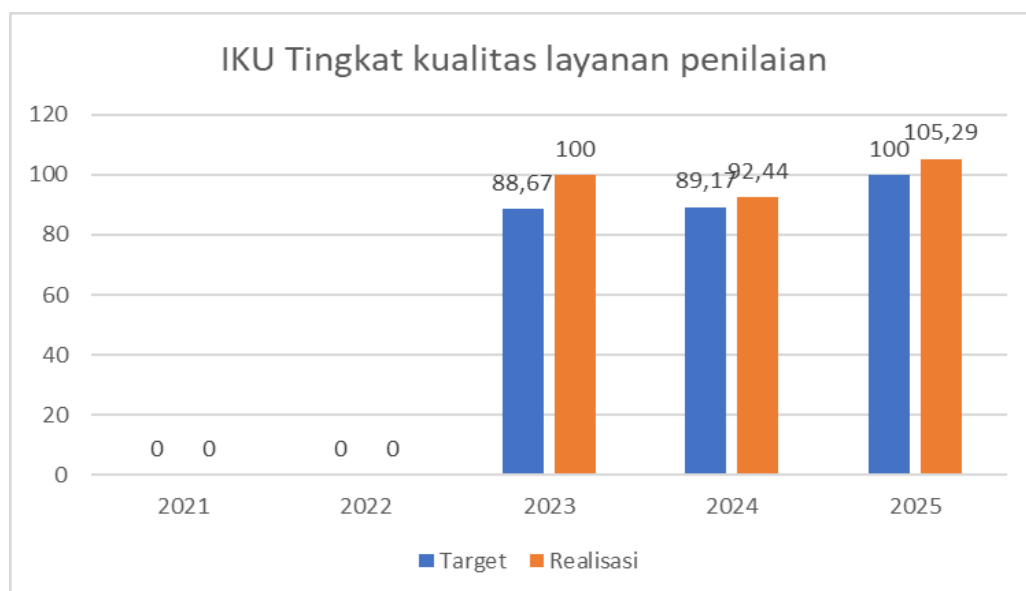
**Tabel 3.17**  
**Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif							
	Nama IKU : Tingkat Kualitas Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/ TLK
Realisasi	97,83%	102,50%	100,17%	99,16%	100,50%	109,86%	102,84%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

### Analisa data :

Capaian IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian pada periode Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 120% dari target Triwulan IV sebesar 70%. Hal tersebut dicapai dengan senantiasa menyelesaikan layanan penilaian BMN lebih cepat dari norma waktu yang telah ditentukan dan menyelesaikan laporan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Gambar 3.13**  
**Realisasi IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian 5 tahun terakhir**



### 5.3. Persentase Produktivitas Lelang

Pencapaian IKU Persentase Produktivitas Lelang dinyatakan dengan jumlah obyek lelang yang laku terjual. Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
**Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Keuangan Dan BMN Yang Akuntabel, Serta SDM Yang Adaptif							
	Nama IKU : Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	60,46%	80,37%	80,37%	110,66%	110,66%	120%	120%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

#### Analisa Data :

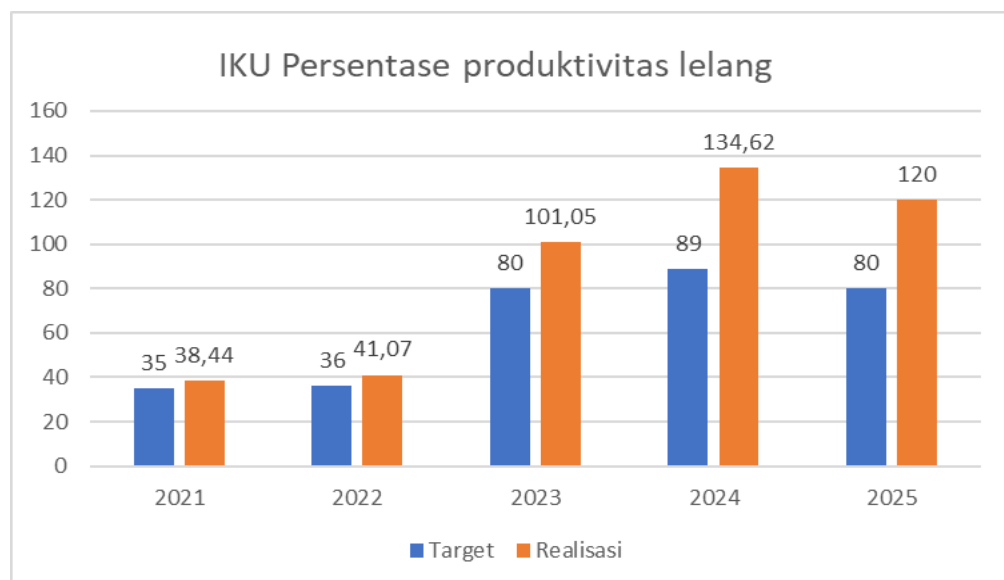
Jumlah keseluruhan frekuensi lelang Tahun 2025 pada KPKNL Jember sebanyak 1.151 frekuensi, dengan rincian total persentase produktivitas lelang sebagai berikut :

**Tabel 3.19**  
**Realisasi IKU Persentase Produktivitas Lelang**

Uraian	Jumlah Lot Lelang	Jumlah Lot Laku	%Realisasi
Lelang Sukarela	13	13	120%
Non Eksekusi Wajib	163	154	
Eksekusi HT	2.039	273	
Eksekusi selain HT	2.079	27	
Frekuensi Lelang	1.151	1.699	120%
<b>Realisasi s.d Desember 2025</b>			<b>120%</b>

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target antara lain melakukan koordinasi dengan penjual/pemohon lelang dalam rangka mengintensifkan pemasaran lelang, penggalian potensi lelang dan mencari pembeli potensial.

**Gambar 3.14**  
**Realisasi IKU Persentase Produktivitas Lelang 5 tahun terakhir**



## 6. Pengelolaan Keuangan Dan BMN Yang Akuntabel, Serta SDM Yang Adaptif

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal. Sasaran strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional dijabarkan dalam 3 (tiga) IKU sebagai berikut.

### 6.1. Indeks kualitas kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7) Nilai kinerja anggaran (NKA) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

1. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
2. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.20**  
**Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Keuangan Dan BMN Yang Akuntabel, Serta SDM Yang Adaptif							
	Nama IKU : Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120%	111,80%	111,80%	112,07%	112,07%	120%	120%	
Capaian	120	111,80	111,80	112,07%	112,07%	120%	120%	

#### Analisa Data :

Capaian Nilai kinerja Pelaksanaan anggaran KPKNL Jember pada periode Triwulan 4 tahun 2025 adalah 97,14 dan capaian nilai kinerja perencanaan anggaran 97,66, sehingga diperoleh

Nilai kinerja anggaran Triwulan 4 adalah sebesar 97.40, dengan ketentuan realisasi IKU apabila NKA>95 maka capaian IKU adalah 120.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian IKU tersebut antara lain memastikan penyerapan anggaran dan rencana penarikan dana sesuai dengan target yang dibuat pada tiap-tiap periode triwulan.

**Gambar 3.15**  
**Realisasi IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran 5 tahun terakhir**



## 6.2. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini mengukur dua komponen, yaitu:

### 1. Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan

Program Kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

### 2. Kualitas Pemenuhan Standard JP bagi Pegawai

Kualitas Pemenuhan Standard JP bagi Pegawai Definisi: mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan

tugas dan fungsi. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.21**  
**Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Akuntabel, Serta Adaptif							
	Nama IKU : Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	22%	61,13%	61,13%	80,07%	80,07%	94%	94%	
Capaian	110	120	120	120	120	117,50	117,50	

**Analisis Data :**

Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada periode Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 94% dari target Triwulan IV sebesar 80%. Adapun penjelasan mengenai capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai periode Triwulan IV Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Komponen Kebintalan: 110%

Komponen Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan : 100%

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU ini antara lain :

- a. mengusulkan diklat/pelatihan/e-learning pada aplikasi diklat;
- b. melaksanakan kegiatan kebingkasan dan sinergi antar generasi dimana pimpinan unit secara aktif terlibat langsung dalam memberikan bimbingan.

**Gambar 3.16**  
**Realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 5 tahun terakhir**



### 6.3. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

IKU ini mengukur komponen berikut :

1. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); dan
2. Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Capaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.22**  
**Capaian IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Keuangan Dan BMN Yang Akuntabel, Serta SDM Yang Adaptif							
	Nama IKU : Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120%	120%	120%	112,50%	112,50%	125,22%	125,22%	
Capaian	120	120	120	112,50%	112,50%	120%	120%	

#### Analisa Data :

Capaian masing-masing komponen pendukung IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa KPKNL Jember tahun 2025 adalah :

- a. Capaian Indeks PDN = 120%
- b. Capaian SIRUP : 120%
- c. Capaian E-Tendering : -
- d. Capaian E-Purchasing Katalog : 100%
- e. Capaian Non E-Tendering dan Non E-Purchasing : 82%
- f. Capaian E-Kontrak : -

### 7. Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif

Penanganan hukum yang dilakukan DJKN dh. KPKNL dilakukan dalam rangka memberikan pendampingan, penanganan perkara, dan telaahan hukum yang dilakukan secara efektif. Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat

sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Pencapaian sasaran strategis ini dijabarkan dalam 2 (dua) IKU sebagai berikut:

### 7.1. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum :

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu :

- a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- b. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.23**  
**Capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif							
	Nama IKU : Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	116,02	117,03	117,03	115,68	115,68	116,40	116,40	
Capaian	116,02	117,03	117,03	115,68	115,68	116,40	116,40	

#### Analisa Data :

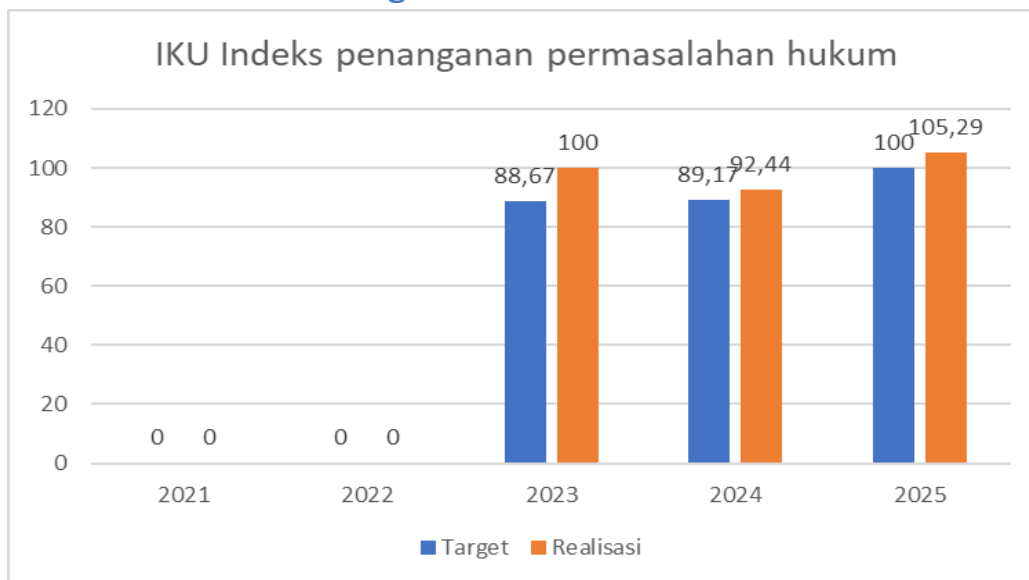
Sampai dengan periode akhir Triwulan IV 2025, jumlah perkara yang ditangani oleh KPKNL Jember sejumlah 99 perkara yang keseluruhannya merupakan gugatan terhadap pelaksanaan lelang. Dari jumlah tersebut sebanyak 71 perkara masih aktif ditangani, 23 perkara sudah terdapat putusan Inkracht Menang, 4 perkara di cabut, dan 1 perkara dinyatakan gugur. Capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum KPKNL Jember pada periode Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 116.40 dari target Triwulan IV sebesar 100. Nilai tersebut diperoleh dari nilai 2 (dua) komponen pendukung yaitu :

1. Nilai Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan sebesar 113,26;
2. Nilai Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap sebesar 128,97.

Dalam penanganan perkara, KPKNL Jember senantiasa aktif melaksanakan penanganan perkara di Pengadilan sesuai dengan kewenangannya, baik untuk perkara KPKNL Jember maupun mewakili penanganan perkara yang bersifat ganti rugi atas permohonan dari Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

**Gambar 3.17**

**Realisasi IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum 5 tahun terakhir**



## 7.2. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID Tingkat III pada KPKNL Jember adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID Tingkat III KPKNL Jember bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID Tingkat III KPKNL Jember wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik

Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.24**  
**Capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Komunikasi Publik yang Efektif							
	Nama IKU : Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ AVG
Realisasi	115	110	112,5	110	111,67	110	111,25	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

**Analisa Data :**

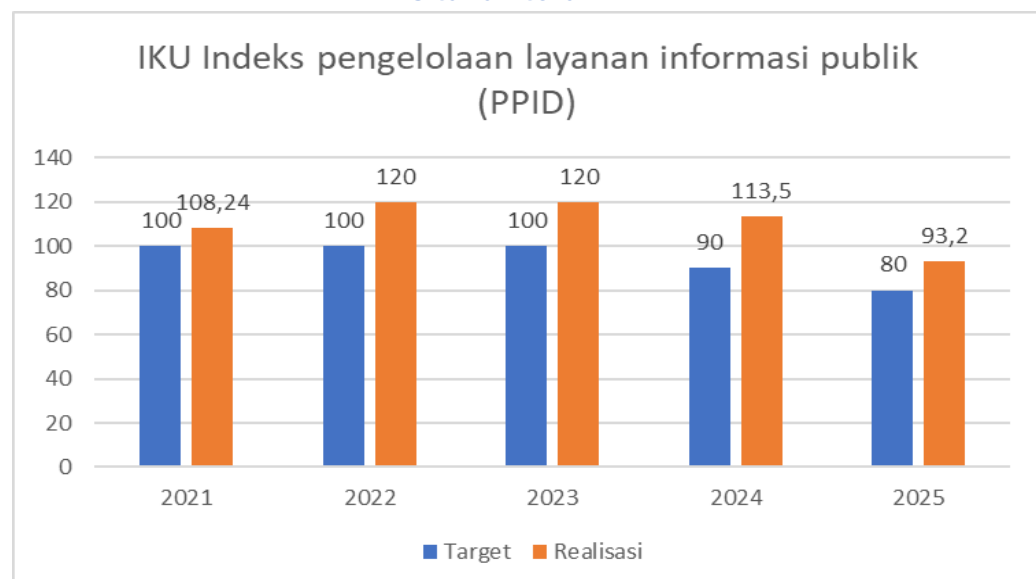
Sampai dengan periode Triwulan IV, KPKNL Jember tidak memiliki permohonan informasi public untuk ditindaklanjuti. Namun demikian target 3 pemutakhiran informasi publik, telah dilengkapi dan dilaksanakan 60 hari sebelum jatuh tempo.

Penyampaian permintaan informasi publik = 100

Penyampaian laporan permintaan informasi = 100

Pemutakhiran informasi publik = 100

**Gambar 3.18**  
**Realisasi IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)**  
**5 tahun terakhir**



## **8. Pengawasan Dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko Yang Efektif**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pencapaian sasaran strategis ini dijabarkan dalam 2 (dua) IKU sebagai berikut.

### **8.1. Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko**

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Penilaian Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko didasarkan pada 3 komponen yaitu:

- a. Komponen Pengelolaan Kinerja Organisasi (30%);
- b. Komponen Pengelolaan Kinerja Pegawai (30%);
- c. Komponen Manajemen Risiko (40%).

Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Pegawai dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan. KMK ini memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Pengelolaan kinerja organisasi dan pegawai dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen

diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two. Capaian IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.25**  
**Capaian IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	Nama IKU : Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/ TLK
Realisasi	100	95	95	98,37	98,37	<b>98,37</b>	<b>98,37</b>	
Capaian	<b>117,65%</b>	<b>111,76%</b>	<b>111,76%</b>	<b>115,73%</b>	<b>115,73%</b>	<b>115,73%</b>	<b>115,73%</b>	

**Analisis Data :**

Realisasi Capaian tahun 2025 sebesar 97,71, yang terdiri dari 3 aspek penilaian, yaitu :

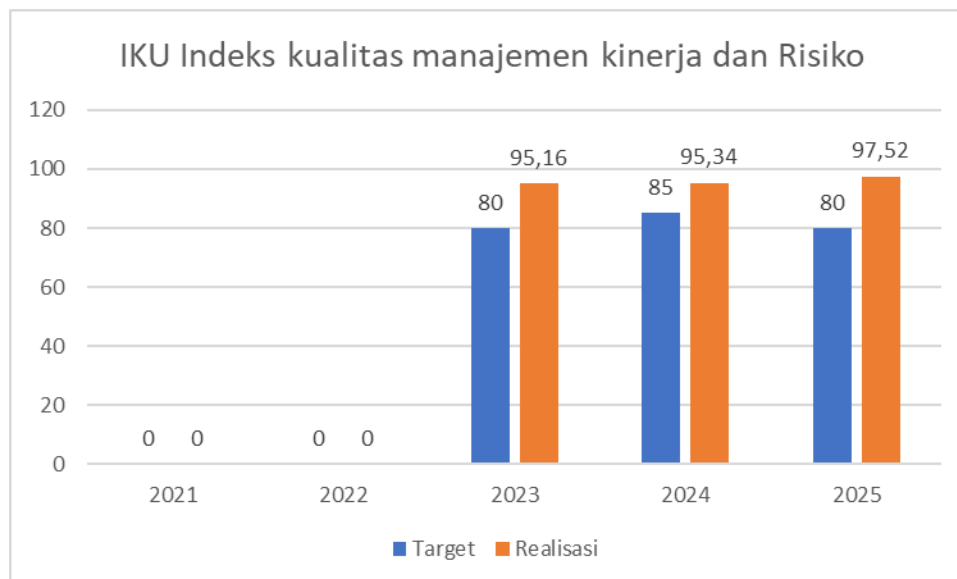
- a. Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi : 100;
- b. Nilai Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai : 94,18; dan
- c. Nilai Kualitas Manajemen Risiko : 98,17.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian realisasi IKU tersebut antara lain :

- 1. melakukan reviu K3 sesuai jadwal yang diberikan;

2. menyampaikan laporan kinerja, kertas kerja NKO, dan dokumentasi DKRO tepat waktu;
3. melaksanakan kegiatan bintal dan sinergi lintas generasi tepat waktu.

**Gambar 3.19**  
**Realisasi IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko 5 tahun terakhir**



## 8.2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi Policy Recommendation, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain Policy Recommendation. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti tahun 2025 pada KPKNL Jember adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.26**  
**Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko Yang Efektif							
	Nama IKU : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	75,5%	82,5%	82,5%	89,75%	89,75%	95,3%	95,3%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	110,65%	110,65%	
Capaian	120	120	120	120	120	116,11	116,11	

### Analisa Data :

Sesuai dengan nota dinas nomor ND-211/KN.1/2025 hal Apresiasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2024 dan Persiapan Pelaksanaan Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tanggal 16 Januari 2025, KPKNL Jember dinyatakan tuntas sesuai rekomendasi.

**Gambar 3.20**  
**Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti 5 tahun terakhir**



### 8.3. Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan. KPKNL Jember sebagai salah satu unit vertikal DJKN berhasil berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada tahun 2019 dan dilanjutkan memperoleh predikat Zona

Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) pada tahun 2021. Capaian IKU Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM tahun 2025 pada KPKNL Jember adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.27**  
**Capaian IKU Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan**  
**Pembangunan ZI-WBK/WBBM**

KPKNL Jember	Nama Sasaran Strategis : Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko Yang Efektif							
	Nama IKU : Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

**Analisa Data :**

Sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 395/KM.1/2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, Serta Pemantauan Dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan, disampaikan bahwa guna menjaga kualitas pelayanan dan integritas pada unit kerja di seluruh unit kerja Kementerian Keuangan, khususnya pada unit kerja yang telah bepredikat ZI-WBK/WBBM, perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi sewaktu-waktu atau paling sedikit setiap 2 tahun sekali. Berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nomor ND-371/KN.1/2025 tanggal 3 Februari 2025, KPKNL Jember yang semula ditetapkan sebagai salah satu kantor yang akan dilakukan Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBBM, berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ND-1063/KN.1/2025 tanggal 16 April 2025 termasuk dalam salah satu kantor yang tidak masuk/dikeluarkan dari lokus monev ZI-WBK/WBBM tahun 2025.

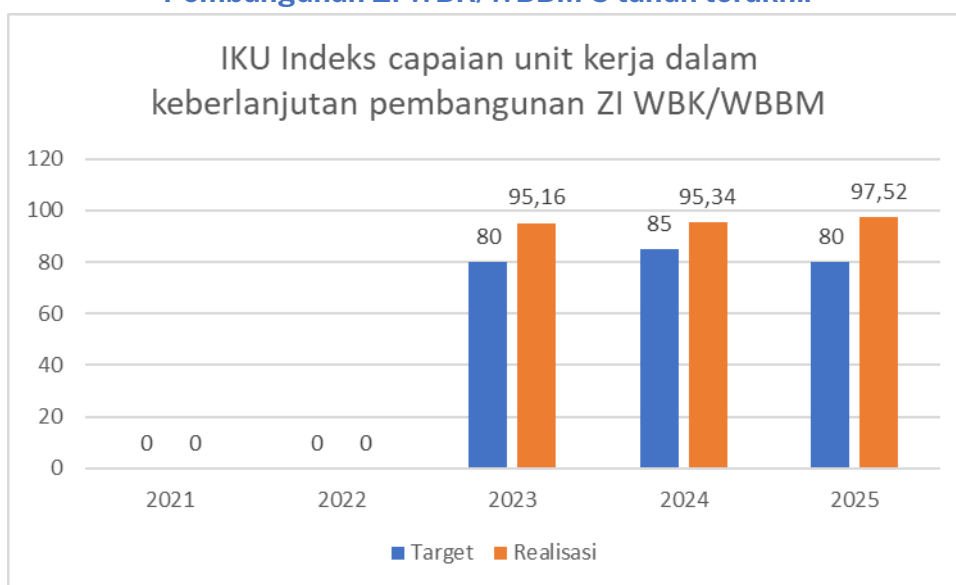
Pada periode Triwulan I terdapat informasi bahwa unit yang dikeluarkan dari lokus monev akan dilakukan adendum IKU dalam hal ini akan dilakukan penghapusan IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM. Pada periode Triwulan II, rencana adendum batal dilaksanakan, melainkan dilakukan revisi manual IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Sebagai realisasi IKU ini di periode Triwulan III adalah penyusunan dan penyampaian bahan paparan keberlanjutan ZI-WBBM. Sedangkan realisasi

IKU di periode Triwulan IV berupa penyampaian laporan Kepala KPKNL Jember kepada Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur tentang Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBBM KPKNL Jember melalui ND-820/KNL.1004/2025 tanggal 15 Desember 2025.

Untuk selanjutnya seluruh kegiatan dan monitoring WBBM yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 akan digunakan sebagai bahan capaian apabila KPKNL Jember kembali ditetapkan menjadi unit kerja yang menjadi lokus keberlanjutan pembangunan ZI-WBBM di tahun 2026.

**Gambar 3.21**  
**Realisasi IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM 5 tahun terakhir**



## B. Realisasi Anggaran

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jember pada tahun 2025 telah dialokasikan dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan pagu sebesar Rp3.076.289.000,-. Alokasi dana tahun 2025 diperuntukan untuk belanja barang dan belanja modal, sementara untuk belanja pegawai sudah terpusat pada Kantor Pusat DJKN

Namun demikian, terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-497/MK.03/2025 tanggal 19 Juli 2025 hal Persetujuan Relaksasi Kebijakan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 pada Kementerian Keuangan, yang berdampak pada pengelolaan DIPA tahun 2025, pada DIPA KPKNL Jember tahun 2025 dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp796.484.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam jutaempat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari total pagu awal anggaran tahun 2025 sebesar Rp3.872.773.000,- (tiga milyar delapan

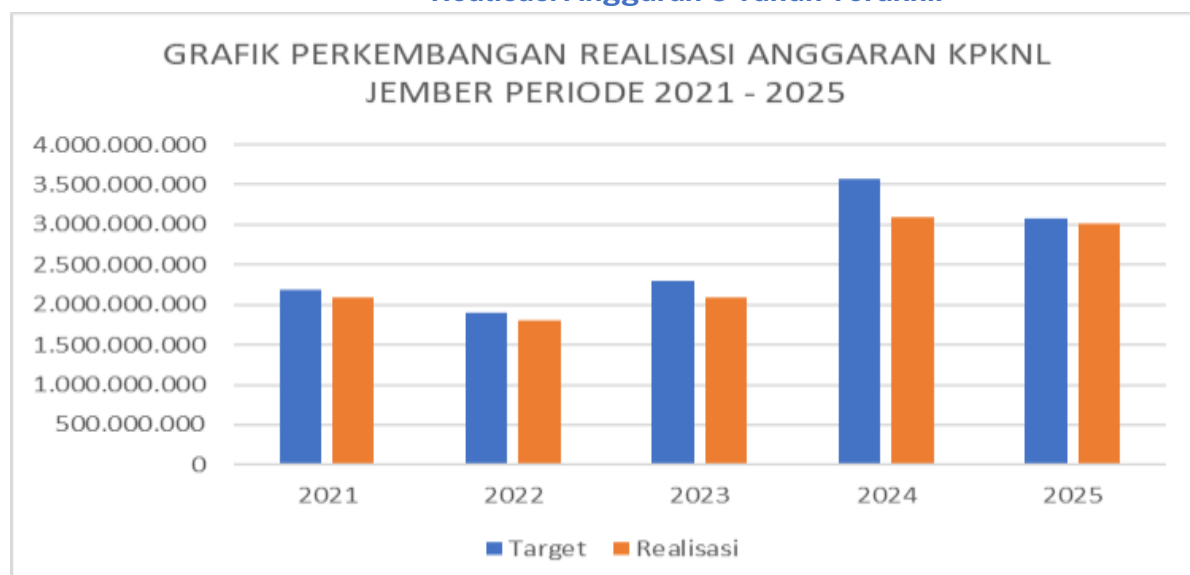
ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Dari sisa anggaran yang dialokasikan tersebut, sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 dapat terealisasi sebesar Rp3.011.254.120,00 atau sebesar 97,90% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.28**  
**REALISASI ANGGARAN BELANJA KPKNL JEMBER**  
**PER 31 DESEMBER 2025**

Uraian	2025			
	Anggaran	Blokir	Realisasi	Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Banja Barang	2.656.931.000	278.715.000	2.316.108.620	97,39%
Belanja Modal	1.215.842.000	517.769.000	695.145.500	99,58%
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>3.872.773.000</b>	<b>796.484.000</b>	<b>3.011.254.120</b>	<b>97,90%</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>3.872.773.000</b>	<b>796.484.000</b>	<b>3.011.254.120</b>	<b>97,90%</b>

Secara garis besar, capaian realisasi penggunaan anggaran pada KPKNL Jember dalam 5 tahun tidak pernah melebihi pagu yang telah ditetapkan dalam setiap tahun anggaran. Hal tersebut dapat tergambar pada grafik berikut :

**Gambar 3.22**  
**Realisasi Anggaran 5 Tahun Terakhir**





04.

Penutup

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Jember ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014).

Sebagai Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang KPKNL Jember telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Secara keseluruhan, kinerja organisasi KPKNL Jember menunjukkan pencapaian yang memuaskan. Semua Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berada pada status hijau, mencerminkan konsistensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Selain itu, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jember tercatat sebesar 116,75%, menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian tahun 2024. Pada tahun 2025, terdapat *addendum* Perjanjian Kinerja. *Addendum* Perjanjian Kinerja merupakan perubahan sebagian informasi pada Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani, Adapun *addendum* pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perubahan Rincian Target Kinerja

Perubahan ini dilakukan karena adanya perubahan target IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara yang semula target 100% dengan nominal Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah)

Namun demikian, memperhatikan capaian kinerja tahun 2025 secara keseluruhan kinerja KPKNL Jember berhasil dalam melaksanakan amanat yang terkandung dalam kontrak kinerja dengan Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur. Hal ini berkat peran serta seluruh pejabat dan pelaksana KPKNL Jember yang mempunyai komitmen dan memiliki rasa kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPKNL didukung pula dengan upaya untuk tetap mengedepankan integritas.

Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan KPKNL Jember dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Penyempurnaan dan penguatan implementasi regulasi di bidang BMN
  - a. Implementasi dan sosialisasi regulasi di bidang pengelolaan BMN kepada satuan kerja sebagaimana yang telah ditetapkan dari Kantor Pusat DJKN;
  - b. Memberikan masukan terkait regulasi di bidang pengelolaan BMN ke Kantor Pusat DJKN.
2. Implementasi basis akrual dan peningkatan kualitas penyajian nilai BMN
  - a. Digitalisasi pengelolaan BMN dalam rangka menyajikan nilai BMN yang akuntabel;
  - b. Memperkuat basis data melalui pencatatan transaksi BMN yang tepat.
3. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif
  - a. Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN;
  - b. Peningkatan monitoring dan evaluasi kepada Satker.
4. Melanjutkan penggalan potensi lelang baik melalui surat maupun kunjungan langsung ke *stakeholder* dan melakukan pemetaan pemohon lelang potensial.
5. Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai
  - a. Mengusulkan diklat bagi para pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
  - b. Menyelenggarakan *In House Training* untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima semua pegawai.
6. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran
  - a. Meningkatkan program efisiensi anggaran dalam segala bidang;
  - b. Melakukan monitoring penyerapan anggaran secara berkala;
  - c. Membuat aplikasi sederhana untuk memantau penyerapan anggaran oleh Kepala Kantor, Kasubbag Umum dan semua Kepala Seksi.
7. Memperkuat pencitraan/*branding* KPKNL melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat, sehingga diharapkan akan lebih mengenal tugas dan fungsi KPKNL seperti kunjungan ke Sekolah, Universitas, Pesantren dan instansi lainnya.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat memberikan gambaran yang transparan dan menjadi instrumen evaluasi yang memacu produktivitas organisasi di periode berikutnya. Harapan kami Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja bagi KPKNL Jember yang dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.



# Lampiran



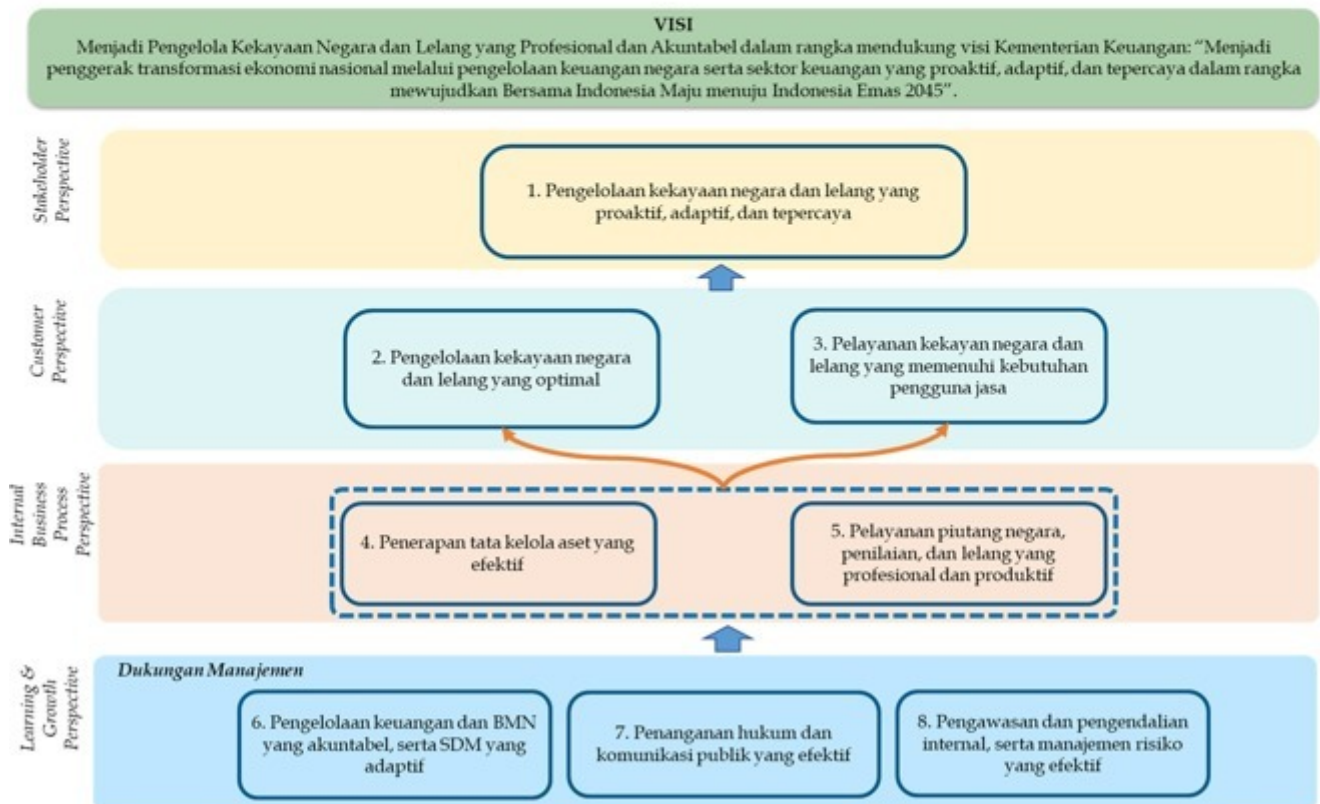
**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-04/WKN.10/2025**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**JEMBER**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
JEMBER  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp19.8 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp169.1 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1.5 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6c-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%
		8c-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100



**Program/Kegiatan 2025**

**Anggaran**

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp702,953,000

Kegiatan

- 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp9,800,000
- 2. Pengelolaan Aset Rp683,153,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp2,864,951,000

Kegiatan

- 1. Legislasi dan Litigasi Rp37,648,000
- 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp2,772,715,000
- 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik Rp22,756,000
- 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp31,832,000

Kab. Jember, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Jawa Timur



Ditandatangani Secara Elektronik  
Dudung Rudi Hendratna

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Jember



Ditandatangani Secara Elektronik  
Wahyu Nendro



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**JEMBER**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>							
1a-CP	Indeks integritas	20	50	50	70	70	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp19.8 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp169.1 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1.5 M)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kab. Jember, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember



Ditandatangani Secara Elektronik  
Wahyu Nendro



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kab. Jember, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember



Ditandatangani Secara Elektronik  
Wahyu Nendro



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Wahyu Nendro		NAMA	Dudung Rudi Hendratna
NIP	19711006 199703 1 002		NIP	19700622 199103 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp19.8 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp169.1 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1.5 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang	Persentase Barang Milik Negara berupa	100%	Proses Bisnis

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



	efektif	tanah yang disertipikatkan		
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kab. Jember, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dudung Rudi Hendratna  
19700622 199103 1 002



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Nendro  
19711006 199703 1 002

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	30 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	20	50	50	70	70	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp19.8 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp169.1 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1.5 M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74



3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%



	8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									

Kab. Jember, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dudung Rudi Hendratna  
19700622 199103 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Nendro  
19711006 199703 1 002

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*





**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-04A/WKN.10/2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
JEMBER  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2025**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
JEMBER  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp19,8 M)
		1b-CP	Indeks integritas	100
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp169,1 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,9 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
		5c-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (80)
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%
		8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100



**Program/Kegiatan 2025****Anggaran**

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp702,953,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp9,800,000
2. Pengelolaan Aset Rp683,153,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp2,864,951,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp37,648,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp2,772,715,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik Rp22,756,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp31,832,000

Jember, 18 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Jawa TimurDitandatangani Secara Elektronik  
Dudung Rudi HendratnaKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang JemberDitandatangani Secara Elektronik  
Wahyu Nendro

**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**JEMBER**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp19,8 M)
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp169,1 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,9 M)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
5c-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (80)
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-N	Persentase pengembangan	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	kompetensi pegawai							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Jember, 18 Desember 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember



Ditandatangani Secara Elektronik  
Wahyu Nendro



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jember, 18 Desember 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember



Ditandatangani Secara Elektronik  
Wahyu Nendro



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Wahyu Nendro		NAMA	Dudung Rudi Hendratna
NIP	19711006 199703 1 002		NIP	19700622 199103 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp19,8 M)	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp169,1 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,9 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang	Persentase Barang Milik Negara berupa	100%	Proses Bisnis

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 Desember 2025*



	efektif	tanah yang disertipikatkan		
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
		Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (80)	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Jember, 18 Desember 2025

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Nendro

19711006 199703 1 002



Ditandatangani Secara Elektronik

Dudung Rudi Hendratna

19700622 199103 1 002

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 Desember 2025*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	30 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp19,8 M)
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp169,1 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,9 M)
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77



3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
5c-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (80)
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7a-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%



	8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									

Jember, 18 Desember 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Nendro  
19711006 199703 1 002

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dudung Rudi Hendratna  
19700622 199103 1 002

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 18 Desember 2025*



## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III : KPKNL Jember

Tahun Anggaran :2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1. Indeks integritas	100	105,32	105,32	105,32
		2. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	151,25%	151,25	120,00
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	1. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	110,53%	110,53	110,53
		2. Persentase realisasi pokok lelang	100%	147,84%	147,84	120,00
		3. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	120,38%	120,38	120,00
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	1. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	96,25	130,06	120,00
		2. Indeks kepuasan pengguna layanan	77	96,95	125,52	120,00
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	1. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	139,33%	139,33	120,00
		2. Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	114,42%	114,42	114,42
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	1. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	133,88%	133,88	120,00
		2. Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	102,84%	146,91	120,00
		3. Persentase produktivitas lelang	80%	120%	150,00	120,00
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	1. Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120,00	120,00
		2. Persentase pengembangan kompetensi Pegawai	80%	93,2%	116,50	116,50
		3. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	125,22%	125,22	120,00
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	1. Indeks penanganan permasalahan hukum	100	116,40	116,40	116,40
		2. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	111,25	139,06	120,00

8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	1. Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	96,52	121,90	120,00
		2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95,3%	110,65%	116,11	116,11
		3. Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM	100	120	120,00	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>					<b>116,75</b>	

**Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja KPKNL Jember Tahun 2025**

No	Uraian	Belanja				Capaian Kinerja		
		Anggaran	Blokir	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<b>CD</b>	<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaa</b>	<b>518,552,000</b>	<b>56,752,000</b>	<b>459,397,216</b>	<b>99,48%</b>			
<b>4796</b>	<b>Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi</b>	<b>9,800,000</b>	<b>9,800,000</b>	-	-			
	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	9,800,000	9,800,000	-	-			
	001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	4,400,000	4,400,000	-	-	60	62	100%
	002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	2,200,000	2,200,000	-	-	30	30	100%
	003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	3,200,000	3,200,000	-	-	50	55	100%
<b>4798</b>	<b>Pengelolaan Aset</b>	<b>508,752,000</b>	<b>46,952,000</b>	<b>459,397,216</b>	<b>99,48%</b>			
	AAH Peraturan lainnya	144,675,000	4,305,000	140,049,863	99,77%			
	001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	102,365,000	4,305,000	98,059,650	100%	100	334	100%
	002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	42,310,000	-	41,990,213	99,24%	30	68	100%
	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuang	61,888,000	1,263,000	60,625,000	100%			
	002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	61,888,000	1,263,000	60,625,000	100%	770	899	100%
	BAH Pelayanan Publik Lainnya	44,142,000	-	43,803,000	99,23%			
	001 Risalah Lelang	44,142,000	-	43,803,000	99,23%	520	525	100%
	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelapora	115,310,000	15,196,000	98,991,761	98,88%			
	004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	69,778,000	100,000	69,314,761	99,48%	5	22	100%
	005 Rekomendasi Hasil Penilaian	17,920,000	100,000	17,343,000	97,32%	2	2	100%
	007 Penggalian Potensi Lelang	27,612,000	14,996,000	12,334,000	97,76%	1	3	100%
	FAK Pengelolaan Aset BUN	47,240,000	-	46,618,592	98,68%			
	001 Aset BUN yang Dikelola	47,240,000	-	46,618,592	98,68%	7	7	100%
	UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	95,497,000	26,188,000	69,309,000	100%			
	201 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikat	95,497,000	26,188,000	69,309,000	100%	253	446	100%
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>3,354,221,000</b>	<b>739,732,000</b>	<b>2,551,856,904</b>	<b>97,62%</b>			
<b>4700</b>	<b>Legislasi dan Litigasi</b>	<b>37,648,000</b>	-	<b>37,551,026</b>	<b>99,74%</b>			
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	37,648,000	-	37,551,026	99,74%			
	969 Layanan Bantuan Hukum	37,648,000	-	37,551,026	99,74%	20	21	100%
<b>4701</b>	<b>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum</b>	<b>3,261,985,000</b>	<b>710,338,000</b>	<b>2,494,091,326</b>	<b>97,74%</b>			

No	Uraian		Belanja				Capaian Kinerja			
			Anggaran	Blokir	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,046,143,000	192,569,000	1,798,945,826	97,05%				
		002 Kerumahtanggaan	90,592,000	17,668,000	72,525,248	99,45%	12	12	100%	
		994 Layanan Perkantoran	1,955,551,000	174,901,000	1,726,420,578	96,95%	12	12	100%	
	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,215,842,000	517,769,000	695,145,500	99,58%				
		001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	656,166,000	328,083,000	326,195,500	99,42%	16	16	100%	
		003 Kendaraan Bermotor	369,990,000	-	368,950,000	99,72%	2	2	100%	
		004 Gedung/Bangunan	189,686,000	189,686,000	-	-				
	<b>4702</b>	<b>Pengelolaan komunikasi dan informasi publik</b>		<b>22,756,000</b>	<b>12,578,000</b>	<b>5,603,400</b>	<b>55,05%</b>			
		BMB	Komunikasi Publik	22,756,000	12,578,000	5,603,400	55,05%			
			001 Pembinaan/Edukasi Publik	15,800,000	10,600,000	4,947,400	95,14%	30	50	100%
002 Kehumasan	6,956,000		1,978,000	656,000	13,18%	1	5	100%		
<b>4704</b>	<b>Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal</b>		<b>31,832,000</b>	<b>16,816,000</b>	<b>14,611,152</b>	<b>99,97%</b>				
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	31,832,000	16,816,000	14,611,152	99,97%				
		001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	31,832,000	16,816,000	14,611,152	99,97%	5	10	100%	

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**Satuan Kerja** : 538140 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Hal 1 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>3,076,289,000</b>	<b>0</b>	<b>2,697,197,019</b>	<b>314,457,101</b>	<b>3,011,654,120</b>	<b>97.90 %</b>	<b>64,634,880</b>
CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	461,800,000	0	412,420,828	46,976,388	459,397,216	99.48 %	2,402,784
CD.4798 Pengelolaan Aset	461,800,000	0	412,420,828	46,976,388	459,397,216	99.48 %	2,402,784
<b>AAH Peraturan lainnya</b>	<b>140,370,000</b>	<b>0</b>	<b>112,963,339</b>	<b>27,086,524</b>	<b>140,049,863</b>	<b>99.77 %</b>	<b>320,137</b>
<b>AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara</b>	<b>98,060,000</b>	<b>0</b>	<b>84,222,126</b>	<b>13,837,524</b>	<b>98,059,650</b>	<b>100.00</b>	<b>350</b>
<b>005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>	<b>98,060,000</b>	<b>0</b>	<b>84,222,126</b>	<b>13,837,524</b>	<b>98,059,650</b>	<b>100.00</b>	<b>350</b>
005.0A Penelitian dan Pemberian Rekomendasi di Bidang PKN	17,687,000	0	13,418,476	4,268,524	17,687,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,687,000	0	13,418,476	4,268,524	17,687,000	100.00	0
000016. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	15,744,000	0	12,508,191	3,235,809	15,744,000	100.00	0
000017. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (JAWA TIMUR)	912,000	0	910,285	1,715	912,000	100.00	0
000018. Biaya Transportasi Luar Kota (Kendaraan Umum)	1,024,000	0	0	1,024,000	1,024,000	100.00	0
000157. Pembulatan	7,000	0	0	7,000	7,000	100.00	0
005.0B Survey Lapangan, Uji Kompetensi, Uji Petik, dan Pelaksanaan Penilaian	80,373,000	0	70,803,650	9,569,000	80,372,650	100.00	350
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76,998,000	0	67,428,650	9,569,000	76,997,650	100.00	350
000020. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	39,360,000	0	32,921,200	6,438,800	39,360,000	100.00	0
000021. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (JAWA TIMUR)	21,978,000	0	20,575,450	1,402,550	21,978,000	100.00	0
000022. Biaya Transportasi Luar Kota	15,660,000	0	13,932,000	1,727,650	15,659,650	100.00	350
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,375,000	0	3,375,000	0	3,375,000	100.00	0
000023. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	3,375,000	0	3,375,000	0	3,375,000	100.00	0
<b>AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara</b>	<b>42,310,000</b>	<b>0</b>	<b>28,741,213</b>	<b>13,249,000</b>	<b>41,990,213</b>	<b>99.24 %</b>	<b>319,787</b>
<b>005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>	<b>42,310,000</b>	<b>0</b>	<b>28,741,213</b>	<b>13,249,000</b>	<b>41,990,213</b>	<b>99.24 %</b>	<b>319,787</b>
005.0A Koordinasi dan Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara	42,310,000	0	28,741,213	13,249,000	41,990,213	99.24 %	319,787
521211 Belanja Bahan	2,734,000	0	0	2,700,000	2,700,000	98.76 %	34,000
000010. Biaya Pengumuman Panggilan Lelang PUPN	2,734,000	0	0	2,700,000	2,700,000	98.76 %	34,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38,040,000	0	27,333,213	10,421,000	37,754,213	99.25 %	285,787

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**Satuan Kerja : 538140 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Hal 2 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000012. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	15,744,000	0	8,320,000	7,138,213	15,458,213	98.18 %	285,787
000013. Biaya Penginapan Perjalan Dinas (JAWA TIMUR)	9,768,000	0	6,485,213	3,282,787	9,768,000	100.00	0
000014. Biaya Transportasi Luar Kota (Kendaraan Umum)	12,528,000	0	12,528,000	0	12,528,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,536,000	0	1,408,000	128,000	1,536,000	100.00	0
000015. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (JAWA TIMUR)	1,536,000	0	1,408,000	128,000	1,536,000	100.00	0
<b>ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</b>	<b>60,625,000</b>	<b>0</b>	<b>60,625,000</b>	<b>0</b>	<b>60,625,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>ABA.002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset</b>	<b>60,625,000</b>	<b>0</b>	<b>60,625,000</b>	<b>0</b>	<b>60,625,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>	<b>60,625,000</b>	<b>0</b>	<b>60,625,000</b>	<b>0</b>	<b>60,625,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
005.0A Implementasi Evaluasi Portofolio Aset	60,625,000	0	60,625,000	0	60,625,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56,529,000	0	56,529,000	0	56,529,000	100.00	0
000027. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	21,648,000	0	21,648,000	0	21,648,000	100.00	0
000028. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA TIMUR)	26,862,000	0	26,862,000	0	26,862,000	100.00	0
000029. Biaya Transportasi Luar Kota (Kendaraan Umum)	8,019,000	0	8,019,000	0	8,019,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,096,000	0	4,096,000	0	4,096,000	100.00	0
000030. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (JAWA TIMUR)	4,096,000	0	4,096,000	0	4,096,000	100.00	0
<b>BAH Pelayanan Publik Lainnya</b>	<b>44,142,000</b>	<b>0</b>	<b>42,146,412</b>	<b>1,656,588</b>	<b>43,803,000</b>	<b>99.23 %</b>	<b>339,000</b>
<b>BAH.001 Risalah Lelang</b>	<b>44,142,000</b>	<b>0</b>	<b>42,146,412</b>	<b>1,656,588</b>	<b>43,803,000</b>	<b>99.23 %</b>	<b>339,000</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>44,142,000</b>	<b>0</b>	<b>42,146,412</b>	<b>1,656,588</b>	<b>43,803,000</b>	<b>99.23 %</b>	<b>339,000</b>
100.0A Identifikasi, Verifikasi, Koordinasi, dan Pelaksanaan Lelang	44,142,000	0	42,146,412	1,656,588	43,803,000	99.23 %	339,000
521211 Belanja Bahan	3,054,000	0	2,715,000	0	2,715,000	88.90 %	339,000
000031. Biaya Bahan Cetak dan Penjilidan	3,054,000	0	2,715,000	0	2,715,000	88.90 %	339,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40,192,000	0	38,535,412	1,656,588	40,192,000	100.00	0
000032. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	24,928,000	0	24,318,012	609,988	24,928,000	100.00	0
000033. Biaya Transportasi Luar Kota (Kendaraan Umum)	15,200,000	0	14,217,400	982,600	15,200,000	100.00	0
000156. Pembulatan	64,000	0	0	64,000	64,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**Satuan Kerja** : 538140 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Hal 3 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	896,000	0	896,000	0	896,000	100.00	0
000034. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	896,000	0	896,000	0	896,000	100.00	0
<b>FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</b>	<b>100,114,000</b>	<b>0</b>	<b>82,564,485</b>	<b>16,427,276</b>	<b>98,991,761</b>	<b>98.88 %</b>	<b>1,122,239</b>
<b>FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara</b>	<b>69,678,000</b>	<b>0</b>	<b>60,870,485</b>	<b>8,444,276</b>	<b>69,314,761</b>	<b>99.48 %</b>	<b>363,239</b>
<b>005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>	<b>69,678,000</b>	<b>0</b>	<b>60,870,485</b>	<b>8,444,276</b>	<b>69,314,761</b>	<b>99.48 %</b>	<b>363,239</b>
005.0A Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN	13,458,000	0	12,506,000	652,685	13,158,685	97.78 %	299,315
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,674,000	0	10,386,000	0	10,386,000	97.30 %	288,000
000035. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	3,936,000	0	3,936,000	0	3,936,000	100.00	0
000036. Biaya Penginapan (JAWA TIMUR)	4,884,000	0	4,884,000	0	4,884,000	100.00	0
000037. Biaya Transportasi Luar Kota (JAWA TIMUR)	1,854,000	0	1,566,000	0	1,566,000	84.47 %	288,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,784,000	0	2,120,000	652,685	2,772,685	99.59 %	11,315
000038. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (JAWA TIMUR)	2,784,000	0	2,120,000	652,685	2,772,685	99.59 %	11,315
005.0B Monev Pengelolaan BMN	56,220,000	0	48,364,485	7,791,591	56,156,076	99.89 %	63,924
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55,608,000	0	47,752,485	7,791,591	55,544,076	99.89 %	63,924
000039. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	29,520,000	0	21,886,158	7,581,918	29,468,076	99.82 %	51,924
000040. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (JAWA TIMUR)	26,016,000	0	25,866,327	149,673	26,016,000	100.00	0
000173. Pembulatan	72,000	0	0	60,000	60,000	83.33 %	12,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	612,000	0	612,000	0	612,000	100.00	0
000042. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	612,000	0	612,000	0	612,000	100.00	0
<b>FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian</b>	<b>17,820,000</b>	<b>0</b>	<b>9,360,000</b>	<b>7,983,000</b>	<b>17,343,000</b>	<b>97.32 %</b>	<b>477,000</b>
<b>005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>	<b>17,820,000</b>	<b>0</b>	<b>9,360,000</b>	<b>7,983,000</b>	<b>17,343,000</b>	<b>97.32 %</b>	<b>477,000</b>
005.0A Survei Basis Data	8,960,000	0	8,904,000	0	8,904,000	99.38 %	56,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,960,000	0	8,904,000	0	8,904,000	99.38 %	56,000
000050. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (JAWA TIMUR)	8,960,000	0	8,904,000	0	8,904,000	99.38 %	56,000
005.0B Survei DKPB	8,860,000	0	456,000	7,983,000	8,439,000	95.25 %	421,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**Satuan Kerja : 538140 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Hal 4 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,404,000	0	0	7,983,000	7,983,000	94.99 %	421,000
000168. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	3,936,000	0	0	3,727,000	3,727,000	94.69 %	209,000
000169. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (JAWA TIMUR)	3,256,000	0	0	3,256,000	3,256,000	100.00	0
000170. Biaya Transportasi Luar Kota (JAWA TIMUR)	1,212,000	0	0	1,000,000	1,000,000	82.51 %	212,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	456,000	0	456,000	0	456,000	100.00	0
000051. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (JAWA TIMUR)	456,000	0	456,000	0	456,000	100.00	0
<b>FAE.007 Penggalian Potensi Lelang</b>	<b>12,616,000</b>	<b>0</b>	<b>12,334,000</b>	<b>0</b>	<b>12,334,000</b>	<b>97.76 %</b>	<b>282,000</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>12,616,000</b>	<b>0</b>	<b>12,334,000</b>	<b>0</b>	<b>12,334,000</b>	<b>97.76 %</b>	<b>282,000</b>
100.0A Penggalian Potensi Lelang ke Stakeholders	12,616,000	0	12,334,000	0	12,334,000	97.76 %	282,000
521211 Belanja Bahan	1,692,000	0	1,410,000	0	1,410,000	83.33 %	282,000
000043. Penggandaan dan Bahan Cetak	192,000	0	0	0	0	0.00 %	192,000
000044. Snack Rapat Biasa JAWA TIMUR	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000045. Makan Rapat Biasa JAWA TIMUR	900,000	0	810,000	0	810,000	90.00 %	90,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,924,000	0	10,924,000	0	10,924,000	100.00	0
000046. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	5,248,000	0	5,248,000	0	5,248,000	100.00	0
000047. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA TIMUR)	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000	100.00	0
000048. Biaya Transportasi Luar Kota (Kendaraan Umum)	2,088,000	0	2,088,000	0	2,088,000	100.00	0
<b>FAK Pengelolaan Aset BUN</b>	<b>47,240,000</b>	<b>0</b>	<b>45,268,592</b>	<b>1,350,000</b>	<b>46,618,592</b>	<b>98.68 %</b>	<b>621,408</b>
<b>FAK.001 Aset BUN yang Dikelola</b>	<b>47,240,000</b>	<b>0</b>	<b>45,268,592</b>	<b>1,350,000</b>	<b>46,618,592</b>	<b>98.68 %</b>	<b>621,408</b>
<b>005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>	<b>47,240,000</b>	<b>0</b>	<b>45,268,592</b>	<b>1,350,000</b>	<b>46,618,592</b>	<b>98.68 %</b>	<b>621,408</b>
005.0A Pengelolaan BMN Idle	37,570,000	0	37,539,768	0	37,539,768	99.92 %	30,232
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	37,570,000	0	37,539,768	0	37,539,768	99.92 %	30,232
000053. Pemeliharaan Rumah Negara Luas 151 m2	25,670,000	0	25,639,768	0	25,639,768	99.88 %	30,232
000054. Pemeliharaan Rumah Negara Luas 70 m2	11,900,000	0	11,900,000	0	11,900,000	100.00	0
005.0B Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (Aset Eks BPPN)	9,670,000	0	7,728,824	1,350,000	9,078,824	93.89 %	591,176
521211 Belanja Bahan	460,000	0	0	150,000	150,000	32.61 %	310,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**Satuan Kerja** : 538140 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Hal 5 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000055. Fotokopi dan Penjilidan	460,000	0	0	150,000	150,000	32.61 %	310,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,600,000	0	2,400,000	1,200,000	3,600,000	100.00	0
000056. Uang Balas Jasa Waker	3,600,000	0	2,400,000	1,200,000	3,600,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,854,000	0	4,588,824	0	4,588,824	94.54 %	265,176
000057. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	1,968,000	0	1,968,000	0	1,968,000	100.00	0
000058. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA TIMUR)	2,400,000	0	2,134,824	0	2,134,824	88.95 %	265,176
000059. Biaya Transportasi Luar Kota (Kendaraan Umum)	486,000	0	486,000	0	486,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	756,000	0	740,000	0	740,000	97.88 %	16,000
000060. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (JAWA TIMUR)	756,000	0	740,000	0	740,000	97.88 %	16,000
<b>UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</b>	<b>69,309,000</b>	<b>0</b>	<b>68,853,000</b>	<b>456,000</b>	<b>69,309,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>UAE.201 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Desertipikatkan (PN)</b>	<b>69,309,000</b>	<b>0</b>	<b>68,853,000</b>	<b>456,000</b>	<b>69,309,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>	<b>69,309,000</b>	<b>0</b>	<b>68,853,000</b>	<b>456,000</b>	<b>69,309,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>005.0A TANPA SUB KOMPONEN</b>	<b>69,309,000</b>	<b>0</b>	<b>68,853,000</b>	<b>456,000</b>	<b>69,309,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,005,000	0	66,805,000	200,000	67,005,000	100.00	0
000063. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	47,700,000	0	47,700,000	0	47,700,000	100.00	0
000064. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA TIMUR)	18,169,000	0	18,169,000	0	18,169,000	100.00	0
000065. Biaya Transportasi Luar Kota (Kendaraan Umum)	969,000	0	769,000	200,000	969,000	100.00	0
000167. Pembulatan	167,000	0	167,000	0	167,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,304,000	0	2,048,000	256,000	2,304,000	100.00	0
000066. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (JAWA TIMUR)	2,304,000	0	2,048,000	256,000	2,304,000	100.00	0
WA Program Dukungan Manajemen	2,614,489,000	0	2,284,776,191	267,480,713	2,552,256,904	97.62 %	62,232,096
WA.4700 Legislasi dan Litigasi	37,648,000	0	32,021,226	5,529,800	37,551,026	99.74 %	96,974
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>37,648,000</b>	<b>0</b>	<b>32,021,226</b>	<b>5,529,800</b>	<b>37,551,026</b>	<b>99.74 %</b>	<b>96,974</b>
<b>EBA.969 Layanan Bantuan Hukum</b>	<b>37,648,000</b>	<b>0</b>	<b>32,021,226</b>	<b>5,529,800</b>	<b>37,551,026</b>	<b>99.74 %</b>	<b>96,974</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>37,648,000</b>	<b>0</b>	<b>32,021,226</b>	<b>5,529,800</b>	<b>37,551,026</b>	<b>99.74 %</b>	<b>96,974</b>

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**Satuan Kerja** : 538140 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Hal 6 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
100.0A Pelaksanaan Advokasi Hukum	37,648,000	0	32,021,226	5,529,800	37,551,026	99.74 %	96,974
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,850,000	0	2,357,000	1,493,000	3,850,000	100.00	0
000067. Biaya Beracara di Pengadilan	3,850,000	0	2,357,000	1,493,000	3,850,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,646,000	0	28,548,226	4,036,800	32,585,026	99.81 %	60,974
000068. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	26,896,000	0	23,177,699	3,657,327	26,835,026	99.77 %	60,974
000069. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA TIMUR)	2,912,000	0	2,532,527	379,473	2,912,000	100.00	0
000070. Biaya Transportasi Luar Kota (JAWA TIMUR)	2,838,000	0	2,838,000	0	2,838,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,152,000	0	1,116,000	0	1,116,000	96.88 %	36,000
000071. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1,152,000	0	1,116,000	0	1,116,000	96.88 %	36,000
WA.4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,551,647,000	0	2,233,996,413	260,094,913	2,494,091,326	97.74 %	57,555,674
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>1,853,574,000</b>	<b>0</b>	<b>1,541,203,913</b>	<b>257,741,913</b>	<b>1,798,945,826</b>	<b>97.05 %</b>	<b>54,628,174</b>
<b>EBA.002 Kerumahtangaan</b>	<b>72,924,000</b>	<b>0</b>	<b>63,808,812</b>	<b>8,716,436</b>	<b>72,525,248</b>	<b>99.45 %</b>	<b>398,752</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>72,924,000</b>	<b>0</b>	<b>63,808,812</b>	<b>8,716,436</b>	<b>72,525,248</b>	<b>99.45 %</b>	<b>398,752</b>
100.0A Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga, dan Perlengkapan	72,924,000	0	63,808,812	8,716,436	72,525,248	99.45 %	398,752
521211 Belanja Bahan	2,200,000	0	1,849,400	112,000	1,961,400	89.15 %	238,600
000122. Biaya penggandaan, pencetakan, dan penjilidan	2,200,000	0	1,849,400	112,000	1,961,400	89.15 %	238,600
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69,956,000	0	61,191,412	8,604,436	69,795,848	99.77 %	160,152
000125. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	36,736,000	0	28,288,000	8,287,848	36,575,848	99.56 %	160,152
000126. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA TIMUR)	22,832,000	0	22,705,260	126,740	22,832,000	100.00	0
000127. Biaya Transportasi Luar Kota	10,212,000	0	10,198,152	13,848	10,212,000	100.00	0
000155. Pembulatan	176,000	0	0	176,000	176,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	768,000	0	768,000	0	768,000	100.00	0
000128. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	768,000	0	768,000	0	768,000	100.00	0
<b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>	<b>1,780,650,000</b>	<b>0</b>	<b>1,477,395,101</b>	<b>249,025,477</b>	<b>1,726,420,578</b>	<b>96.95 %</b>	<b>54,229,422</b>
<b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>1,780,650,000</b>	<b>0</b>	<b>1,477,395,101</b>	<b>249,025,477</b>	<b>1,726,420,578</b>	<b>96.95 %</b>	<b>54,229,422</b>

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**Satuan Kerja** : 538140 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Hal 7 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0A Pembayaran Biaya Operasional Kantor	1,206,424,000	0	1,077,284,095	103,055,253	1,180,339,348	97.84 %	26,084,652
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	920,776,000	0	836,153,000	80,519,253	916,672,253	99.55 %	4,103,747
000072. keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Jawa Timur)	60,440,000	0	41,497,150	15,988,455	57,485,605	95.11 %	2,954,395
000073. Honorarium Satpam Pengemudi (JAWA TIMUR)	405,600,000	0	374,400,000	31,200,000	405,600,000	100.00	0
000074. Honorarium Pramubakti (JAWA TIMUR)	146,250,000	0	135,000,000	11,250,000	146,250,000	100.00	0
000075. Biaya Tenaga Kebersihan Alih Daya (Outsourcing)	250,000,000	0	229,809,000	19,929,000	249,738,000	99.90 %	262,000
000076. Biaya Jamuan Tamu	6,000,000	0	4,901,500	1,071,400	5,972,900	99.55 %	27,100
000077. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Jawa Timur)	38,502,000	0	38,104,000	0	38,104,000	98.97 %	398,000
000078. Pakaian Kerja Satpam (Jawa Timur)	8,484,000	0	8,446,200	0	8,446,200	99.55 %	37,800
000079. Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Jawa Timur)	5,500,000	0	3,995,150	1,080,398	5,075,548	92.28 %	424,452
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	24,624,000	0	24,389,444	0	24,389,444	99.05 %	234,556
000080. Vitamin untuk daya tahan tubuh	24,624,000	0	24,389,444	0	24,389,444	99.05 %	234,556
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	48,984,000	0	28,464,900	1,719,000	30,183,900	61.62 %	18,800,100
000081. Belanja Pengiriman Surat Dinas	48,984,000	0	28,464,900	1,719,000	30,183,900	61.62 %	18,800,100
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	105,840,000	0	88,200,000	17,640,000	105,840,000	100.00	0
000083. Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000	100.00	0
000085. Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000086. Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang)	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000087. Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000088. Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang)	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
000090. Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	4,320,000	0	4,320,000	0	4,320,000	100.00	0
000092. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	0	8,160,000	0	8,160,000	100.00	0
000093. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	16,440,000	0	16,440,000	0	16,440,000	100.00	0
000094. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	15,960,000	0	15,960,000	0	15,960,000	100.00	0
000095. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d.	6,360,000	0	6,360,000	0	6,360,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**Satuan Kerja** : 538140 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Hal 8 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Rp5 miliar)	6,360,000	0	6,360,000	0			0
000096. Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	5,640,000	0	5,640,000	0	5,640,000	100.00	0
000097. Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	8,400,000	0	2,680,000	5,720,000	8,400,000	100.00	0
000099. Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	7,800,000	0	650,000	7,150,000	7,800,000	100.00	0
000100. Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar)	6,360,000	0	1,590,000	4,770,000	6,360,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	51,200,000	0	48,375,000	0	48,375,000	94.48 %	2,825,000
000102. Pelatihan Satpam oleh Polres	1,200,000	0	0	0	0	0.00 %	1,200,000
000166. Pelaksanaan Medical Check Up Pegawai KPKNL Jember	50,000,000	0	48,375,000	0	48,375,000	96.75 %	1,625,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	55,000,000	0	51,701,751	3,177,000	54,878,751	99.78 %	121,249
000103. ATK dan Komputer Supplies	55,000,000	0	51,701,751	3,177,000	54,878,751	99.78 %	121,249
002.0B Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	281,188,000	0	206,029,000	64,340,614	270,369,614	96.15 %	10,818,386
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	281,188,000	0	206,029,000	64,340,614	270,369,614	96.15 %	10,818,386
000105. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Roda 4 Jabatan (Jawa Timur)	36,940,000	0	32,078,350	4,474,400	36,552,750	98.95 %	387,250
000106. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 Pengadaan 2025 (Jawa Timur)	18,470,000	0	0	15,354,204	15,354,204	83.13 %	3,115,796
000107. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Timur)	24,850,000	0	12,425,100	10,106,000	22,531,100	90.67 %	2,318,900
000108. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 Listrik Pengadaan 2025 (Jawa Timur)	1,600,000	0	0	0	0	0.00 %	1,600,000
000109. Pemeliharaan Inventaris Kantor	2,480,000	0	410,400	1,644,000	2,054,400	82.84 %	425,600
000110. Pemeliharaan AC Split	15,250,000	0	10,926,280	4,317,900	15,244,180	99.96 %	5,820
000111. Pemeliharaan Jaringan LAN, CCTV, dan instalasi Listrik	20,000,000	0	15,586,370	3,387,700	18,974,070	94.87 %	1,025,930
000112. Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	21,570,000	0	20,000,000	1,570,000	21,570,000	100.00	0
000113. Pemeliharaan Mesin Fotokopi	720,000	0	373,000	0	373,000	51.81 %	347,000
000114. Pemeliharaan Pompa Air	7,547,000	0	7,547,000	0	7,547,000	100.00	0
000116. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Timur)	110,820,000	0	86,036,500	23,486,410	109,522,910	98.83 %	1,297,090
000154. Pemeliharaan PABX dan Pesawat Telepon	20,941,000	0	20,646,000	0	20,646,000	98.59 %	295,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**Satuan Kerja** : 538140 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Hal 9 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0C Pemeliharaan Gedung/Bangunan	233,958,000	0	172,099,228	61,726,512	233,825,740	99.94 %	132,260
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	101,000,000	0	86,156,576	14,834,375	100,990,951	99.99 %	9,049
000117. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Jawa Timur)	101,000,000	0	86,156,576	14,834,375	100,990,951	99.99 %	9,049
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	132,958,000	0	85,942,652	46,892,137	132,834,789	99.91 %	123,211
000118. Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	45,617,000	0	29,045,280	16,542,137	45,587,417	99.94 %	29,583
000119. Pemeliharaan Bangunan Tempat Parkir	87,280,000	0	56,897,372	30,350,000	87,247,372	99.96 %	32,628
000171. Pembulatan	61,000	0	0	0	0	0.00 %	61,000
002.TJ Jasa Pemeliharaan/Annual Technical Support (ATS)	59,080,000	0	21,982,778	19,903,098	41,885,876	70.90 %	17,194,124
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59,080,000	0	21,982,778	19,903,098	41,885,876	70.90 %	17,194,124
000120. Pemeliharaan Personal Computer/Laptop	37,800,000	0	16,605,000	5,308,998	21,913,998	57.97 %	15,886,002
000121. Pemeliharaan Printer	21,280,000	0	5,377,778	14,594,100	19,971,878	93.85 %	1,308,122
<b>EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>698,073,000</b>	<b>0</b>	<b>692,792,500</b>	<b>2,353,000</b>	<b>695,145,500</b>	<b>99.58 %</b>	<b>2,927,500</b>
<b>EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran</b>	<b>328,083,000</b>	<b>0</b>	<b>323,842,500</b>	<b>2,353,000</b>	<b>326,195,500</b>	<b>99.42 %</b>	<b>1,887,500</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>328,083,000</b>	<b>0</b>	<b>323,842,500</b>	<b>2,353,000</b>	<b>326,195,500</b>	<b>99.42 %</b>	<b>1,887,500</b>
100.0A Tanpa Sub Komponen	328,083,000	0	323,842,500	2,353,000	326,195,500	99.42 %	1,887,500
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	328,083,000	0	323,842,500	2,353,000	326,195,500	99.42 %	1,887,500
000162. AC Split 2 PK	51,250,000	0	50,782,500	0	50,782,500	99.09 %	467,500
000163. Kursi Pegawai	26,950,000	0	25,530,000	0	25,530,000	94.73 %	1,420,000
000164. Genset	249,883,000	0	247,530,000	2,353,000	249,883,000	100.00	0
<b>EBB.003 Kendaraan Bermotor</b>	<b>369,990,000</b>	<b>0</b>	<b>368,950,000</b>	<b>0</b>	<b>368,950,000</b>	<b>99.72 %</b>	<b>1,040,000</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>369,990,000</b>	<b>0</b>	<b>368,950,000</b>	<b>0</b>	<b>368,950,000</b>	<b>99.72 %</b>	<b>1,040,000</b>
100.KA Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	17,690,000	0	16,950,000	0	16,950,000	95.82 %	740,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17,690,000	0	16,950,000	0	16,950,000	95.82 %	740,000
000137. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Listrik Roda 2	17,690,000	0	16,950,000	0	16,950,000	95.82 %	740,000
100.KB Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	352,300,000	0	352,000,000	0	352,000,000	99.91 %	300,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352,300,000	0	352,000,000	0	352,000,000	99.91 %	300,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**Satuan Kerja** : 538140 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Hal 10 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000138. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	352,300,000	0	352,000,000	0	352,000,000	99.91 %	300,000
WA.4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	10,178,000	0	3,947,400	1,656,000	5,603,400	55.05 %	4,574,600
<b>BMB Komunikasi Publik</b>	<b>10,178,000</b>	<b>0</b>	<b>3,947,400</b>	<b>1,656,000</b>	<b>5,603,400</b>	<b>55.05 %</b>	<b>4,574,600</b>
<b>BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik</b>	<b>5,200,000</b>	<b>0</b>	<b>3,947,400</b>	<b>1,000,000</b>	<b>4,947,400</b>	<b>95.14 %</b>	<b>252,600</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>5,200,000</b>	<b>0</b>	<b>3,947,400</b>	<b>1,000,000</b>	<b>4,947,400</b>	<b>95.14 %</b>	<b>252,600</b>
100.0A TANPA SUB KOMPONEN	5,200,000	0	3,947,400	1,000,000	4,947,400	95.14 %	252,600
521211 Belanja Bahan	5,200,000	0	3,947,400	1,000,000	4,947,400	95.14 %	252,600
000143. Seragam HORI	20,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000
000144. Biaya Atribut dan materi public campaign Kemenkeu Satu	5,180,000	0	3,947,400	1,000,000	4,947,400	95.51 %	232,600
<b>BMB.002 Kehumasan</b>	<b>4,978,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656,000</b>	<b>656,000</b>	<b>13.18 %</b>	<b>4,322,000</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>4,978,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656,000</b>	<b>656,000</b>	<b>13.18 %</b>	<b>4,322,000</b>
100.0A Pelaksanaan Publikasi	4,978,000	0	0	656,000	656,000	13.18 %	4,322,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
000139. - Penerbitan Artikel/ Press release di Media Massa	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	850,000	0	0	656,000	656,000	77.18 %	194,000
000140. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	328,000	0	0	328,000	328,000	100.00	0
000141. Biaya Transportasi Luar Kota (Kendaraan Umum)	522,000	0	0	328,000	328,000	62.84 %	194,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	128,000	0	0	0	0	0.00 %	128,000
000142. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (JAWA TIMUR)	128,000	0	0	0	0	0.00 %	128,000
WA.4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	15,016,000	0	14,811,152	200,000	15,011,152	99.97 %	4,848
<b>EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>15,016,000</b>	<b>0</b>	<b>14,811,152</b>	<b>200,000</b>	<b>15,011,152</b>	<b>99.97 %</b>	<b>4,848</b>
<b>EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal</b>	<b>15,016,000</b>	<b>0</b>	<b>14,811,152</b>	<b>200,000</b>	<b>15,011,152</b>	<b>99.97 %</b>	<b>4,848</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>15,016,000</b>	<b>0</b>	<b>14,811,152</b>	<b>200,000</b>	<b>15,011,152</b>	<b>99.97 %</b>	<b>4,848</b>
100.0A Implementasi Pengendalian dan Kepatuhan Internal	15,016,000	0	14,811,152	200,000	15,011,152	99.97 %	4,848
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,504,000	0	14,299,152	200,000	14,499,152	99.97 %	4,848
000147. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)	5,904,000	0	5,904,000	0	5,904,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

**Kementerian** : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
**Unit Organisasi** : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
**Satuan Kerja** : 538140 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Hal 11 dari 11

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000148. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas (JAWA TIMUR)	6,512,000	0	6,307,152	200,000	6,507,152	99.93 %	4,848
000149. Biaya Transportasi Luar Kota (Kendaraan Umum)	2,088,000	0	2,088,000	0	2,088,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	512,000	0	512,000	0	512,000	100.00	0
000150. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (JAWA TIMUR)	512,000	0	512,000	0	512,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# 2025 Laporan Kinerja KPKNL Jember

Clarity in Transition  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA